



# **DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 s/d 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Imam Bonjol Nomor 1 F Semarang Kode Pos 50141  
Telp. 024-3519904, Fax. 024-3519188 Email. [bpbd\\_jateng@yahoo.com](mailto:bpbd_jateng@yahoo.com)  
[www.bpbd.jatengprov.go.id](http://www.bpbd.jatengprov.go.id)

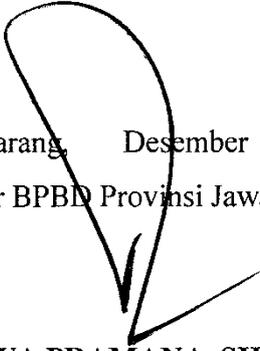
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan perkenan-Nya dapat diterbitkan Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Kontingensi dipahami sebagai suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kontingensi dipahami sebagai suatu kemampuan untuk melakukan perkiraan terhadap segala kemungkinan ancaman bencana yang akan terjadi walaupun belum tentu perkiraan tersebut terjadi. Untuk mendapatkan perkiraan yang mendekati realitas, maka perlu disusun sebuah perencanaan kontingensi yaitu suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana. Di dalam perencanaan tersebut disusunlah skenario dan tujuan yang disepakati bersama oleh para pihak. Disepakati pula tindakan teknis dan manajerial serta sistem tanggapan dan pengarahannya yang disetujui semua pihak untuk mencegah dan mengurangi risiko secara lebih baik dalam situasi darurat. Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan dari *Technical Assistance and Training Teams* (TATTs) menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi tahun 2017 ini.

Penyusunan Dokumen ini didasarkan pada tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, serta masyarakat dan lembaga usahapada upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pembelajaran dari pengalaman sejarah erupsi Gunung Merapi. Melalui dokumen ini diharapkan semua pihak lebih siap menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi di masa mendatang.

Semarang, Desember 2017  
Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah



**SARWA PRAMANA, SH. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610211 198403 1 003

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN.....	vii
<b>BAB I. SITUASI.....</b>	<b>1</b>
1.1. Karakteristik Bahaya Bencana .....	1
1.2. Penilaian Bahaya.....	5
1.3. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak.....	6
1.3.1. Penentuan kejadian.....	6
1.3.2. Pengembangan skenario kejadian.....	7
1.3.3. Pengembangan skenario dampak .....	8
<b>BAB II. TUGAS POKOK.....</b>	<b>11</b>
2.1. Aktivasi Rencana Kontingensi.....	11
2.2. Tujuan dan Strategi .....	11
2.2.1. Tujuan.....	11
2.2.2. Strategi.....	11
<b>BAB III. PELAKSANAAN.....</b>	<b>15</b>
3.1. Konsep Operasi.....	15
3.1.1. Mekanisme pelaksanaan.....	15
3.1.2. Mekanisme permintaan bantuan.....	17
3.1.3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya .....	19
3.1.4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan .....	20
3.2. Fungsi.....	22
3.2.1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi .....	22
3.2.2. Perencanaan.....	22
3.2.3. Operasi.....	23

3.2.4. Logistik.....	23
3.2.5. Administrasi dan keuangan .....	23
3.3. Tugas-Tugas.....	23
3.4. Instruksi Koordinasi .....	30
<b>BAB IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK .....</b>	<b>31</b>
4.1. Administrasi .....	31
4.2. Logistik .....	31
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>33</b>
LAMPIRAN-A: Struktur Koordinasi dengan Pos Pendamping PDB Bencana Erupsi Merapi Prov. Jawa Tengah.....	33
LAMPIRAN-B: Susunan Tugas .....	34
<b>LAMPIRAN-C: Jaring Komunikasi .....</b>	<b>36</b>
LAMPIRAN-D: Peta-Peta.....	37
LAMPIRAN-E: Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya.....	42
<b>LAMPIRAN-F: Prosedur Tetap .....</b>	<b>58</b>
LAMPIRAN-G: Lembar Komitmen .....	59
<b>LAMPIRAN-H: Berita Acara Penyusunan Renkon.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk terdampak Erupsi Merapi .....	4
Tabel 2. Dampak Erupsi Gunung Merapi pada Daerah Terdampak .....	9
Tabel 3. Kebijakan dan Strategi yang Dilakukan.....	14
Tabel 4. Jumlah Sister Village dan Kapasitas TEA nya .....	24
Tabel 5. Lokasi Pengungsian Warga dan Kapasitasnya per Kabupaten .....	27
Tabel 6. Jumlah Lokasi Pengungsian Hewan Ternak dan Kapasitasnya per Kabupaten.....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan pos pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah .....	17
Gambar 2. Mekanisme permintaan bantuan.....	18
Gambar 3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya .....	20
Gambar 4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan .....	22

## DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

- a. *Bencana* adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
- b. *Ancaman Bencana* adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
- c. *Mitigasi* adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (*mitigasi struktural*) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (*mitigasi non-struktural*);
- d. *Peringatan Dini* adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang-wenang;
- e. *Risiko Bencana* adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- f. *Keadaan Darurat Bencana* adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai;
- g. *Status Keadaan Darurat Bencana* adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan/Lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- h. *Tanggap Darurat Bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sesegera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- i. *Bantuan Darurat Bencana* adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- j. *Penanganan Darurat Bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan;
- k. *Bantuan Penanganan Darurat Bencana* adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana;
- l. *Rencana Operasi* adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Rencana operasi ini disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (*Perka BNPB nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB*);
- m. *Komando* adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan,

- mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana;
- n. *Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana* adalah suatu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana;
  - o. *Pos Komando Penanganan Darurat Bencana* yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
  - p. *Pos Lapangan Darurat Bencana* yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian;
  - q. *Klaster/Bidang* adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis;
  - r. *Kelompok rentan* adalah kelompok yang mempunyai risiko lebih besar secara fisik, psikologis atau kesehatan sosial yang terdiri dari lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan balita;
  - s. *Penyandang Disabilitas* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak;
  - t. *Penyintas* adalah orang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian bencana atau guncangan lainnya.
  - u. *Kontingensi/Kontijensi* adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
  - v. *Rencana Kontingensi* adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut.

# BAB I. SITUASI

---

## 1.1. Karakteristik Bahaya Bencana

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.968 m dpl, per 2018) adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunungapi teraktif di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah dapat diasumsikan bahwa setelah letusan besar Merapi 2010 (yang terjadi hanya 100 tahun sekali) tidak diikuti oleh letusan besar kembali tetapi akan masuk ke siklus pendek Merapi. Dari data kegempaan dan aktivitas Merapi sejak 2016 hingga saat ini tidak adanya tanda-tanda perubahan dari 2 tahun terakhir. Kuantitas kegempaan sangat rendah dibanding angka keaktifan pada tahun 2006 dan 2010. Kondisi saat ini sangat tenang. Tidak ada perubahan morfologi secara besar besaran dan tidak mencerminkan aktivitas dari dalam. Berdasarkan sejarahnya, terjadinya *swarm* (rentetan gempa dalam waktu yang singkat/sekelompok gempa yang terjadi pada satu lokasi tertentu. Sering berasosiasi dengan vulkanisme) terjadi sejak 1 tahun sebelum aktivitas hingga saat ini belum terjadi lagi. Yang dapat diamati adalah terbentuknya kawah yang membuka ke arah tenggara/selatan yang membawa implikasi pada ancaman erupsi ke depan akan lebih dominan ke arah selatan. Setelah letusan 1930 letusan setelahnya sampai dengan letusan 2006 (7 dekade) mengarah ke barat daya.

Pada tahun 2018, Gunung Merapi mulai mengalami peningkatan aktivitas. Berdasarkan data Badan (BPPTKG) tercatat beberapa kali letusan yakni tanggal 11 Mei dan 1 Juni 2018 dengan ketinggian kolom asap 5500 m dan 6000 m. Letusan ini disebabkan oleh desakan magma dari kedalaman 3 km yang ditandai dengan munculnya gempa beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya, terjadi pertumbuhan kubah lava pada periode 18 sampai 20 Agustus 2018 dengan volume 12.276 m<sup>3</sup>.

Pada tahun 2020, Gunung Merapi tercatat beberapa kali mengeluarkan letusan kecil yakni periode 4 Januari hingga 10 April 2020 dengan tinggi kolom 3.000 m di atas puncak. Melalui perekaman seismograf tanggal 27 Mei 2020 tercatat Gunung Merapi mengalami 3 kali gempa hembusan, 3 kali gempa guguran, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Berdasarkan hal tersebut BPPTKG menetapkan status “WASPADA” (Level II) Gunung Merapi.

Kubah lava muncul di pusat kawah cenderung ke barat – barat laut, sampai di bagian tengah kubah. Kubah lava dapat terbangun dengan volume maksimal 10 juta m<sup>3</sup>. Pertumbuhan kubah yang cukup besar mengakibatkan ketidakstabilan/ runtuhnya dinding kawah sektor Barat dan sektor Selatan (sekitar bukaan kawah). Ketika kubah lava tidak stabil maka sebagiannya akan runtuh ke arah bukaan kawah saat ini dan juga ke arah bukaan akibat runtuhnya dinding kawah tersebut. Skenario ini mengacu kepada kebanyakan erupsi tipe Merapi yang meruntuhkan lava lama seperti erupsi 1998 dan 2006.

Penetapan peringatan dini pra-kondisi diantaranya sebagai berikut:

- a. Status siaga : kemunculan kubah lava yang mengalami pertumbuhan yang signifikan.
- b. Status awas : Awan panas terjadi intensif dan jarak jangkau > 3 km dari puncak. Data pemantauan gempa VT 0-1 kali/hari, MP 50-150 kali/hari, RF 50-200 kali/hari, dan laju deformasi EDM 0-1 cm/hari.

Adapun potensi bahaya akibat erupsi Gunung Merapi terdiri atas :

a. Bahaya primer

Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk ketika letusan berlangsung, seperti :

- 1) Guguran lava pijar dapat terbentuk akibat guguran atau runtuh kubah lava baru atau tumpukan material lama yang masih panas di puncak. Guguran lava pijar bersifat mem bakar dan merusak lingkungan yang terlanda.
- 2) Awan panas (*Pyroclastic Flow*) : bersifat paling merusak daripada jenis bahaya yang lain. Awan panas adalah aliran massa panas (300 – 600 derajat celcius) berupa campuran gas dan material gunung api yang terdiri dari berbagai ukuran bergumpal bergerak turun secara turbulen dengan kecepatan sampai 100-150 km/jam.
- 3) Surge : lebih *energetic* namun lebih *dilute* dari aliran piroklastik sehingga lebih menyebar. Konsentrasi material 0,1 – 1%.

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi berupa lontaran material vulkanik akan menjangkau radius 3 km dari kubah lava sedangkan bahaya awan panas

terjadi jika kubah lava telah terisi 50% dan runtuh. Perkiraan laju awan panas mengarah ke Kali Kuning (7 km), Kali Boyong (6,5 km), Kali Krasak (7 km), Kali Putih (5 km), Kali Senowo (8 km), Kali Trising (7 km), Kali Apu (4 km).

b. Bahaya sekunder

Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi setelah letusan seperti :

1) Lahar

Aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan karena endapan produkletusan/awan panas yang terbawa air (hujan) dan membentuk aliran pekat mengalir ke area yang lebih rendah di lereng gunung api. Lahar Erupsi Gunung Merapi menempati area 286 km<sup>2</sup> di sekitar Merapi dengan ketebalan endapan rata-rata 0,5-2 m, ekstrim 15 m (Desa. Sisir, Kali Senowo, 1888), 10 m (Desa. Salam, 1931), 25 m (Kali. Blongkeng, 1837). Pemicu lahar adalah hujan, intensitas 40 mm selama 2 jam dengan kecepatan lahar rata-rata 5-7 m/dt (rata-rata 20km/jam) pada elevasi 1.000 m.

2) Lahar hujan di sekitar Erupsi Gunung Merapi

Hujan di lereng barat 2416 mm/tahun, di lereng selatan 3.253 mm/tahun, rata rata terjadi pukul 12.00 Wib – 19.00 Wib, sehingga 80% lahar hujan terjadi sore hari. Hujan lokal/ *stationary/orographic* 66% memicu lahar hujan, hujan *regional/migratory* 33 % menyebabkan lahar hujan dalam skala relatif besar. Lahar hujan terjadi 10 menit setelah intensitas hujan mencapai puncaknya.

c. Bahaya tersier

Bahaya tersier merupakan bahaya akibat kerusakan lingkungan gunung api (hilangnya daerah resapan/hutan/mata air dan akibat dari penambangan).

Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi tersebut menimpa beberapa kawasan dalam kategori Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang terdiri atas :

a. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III

Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran /lontaran material pijar), gas beracun. Berdasarkan pertimbangan posisi kubah lava dan titik kegiatan saat ini

di lereng barat-daya terlanda letusan akan datang terutama awan panas. KRB III menurut Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Jawa Tengah meliputi :

Tabel 1 Jumlah Penduduk terdampak Erupsi Merapi

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	2625	2669		
			Ngargosoko	2380	1381		
			Ngablak	2461	2101		
			Kemiren	1243	1251		
		Jumlah			8709	7402	
		Dukun	Ngargomulyo	2464	1061		
			Keningar	617	634		
			Sengi	4397	2953		
			Krinjing	2191	2238		
			Paten	3145	3257		
			Mangunsoko	1680	418		
		Jumlah			14494	10561	
		<b>Total penduduk terdampak Kabupaten Magelang</b>				<b>23203</b>	<b>17963</b>
		2	Boyolali	Selo	Tlogolele	2595	2601
					Klakah	2882	2816
Lencoh	3247				3156		
Jrakah	4280				4159		
Samiran	3923				3893		
Suroteleng	1836			1826			
Jumlah				18763	18451		
Tamansari	Mriyan			2197	2163		
	Sangup			2574	2546		
Jumlah				4771	4709		
Musuk	Cluntang			2551	2532		
Jumlah				2551	2532		
Cepogo	Wonodoyo			2569	2542		
	Jombong			2304	2276		
Jumlah				4873	4818		
<b>Total penduduk terdampak Kabupaten Boyolali</b>				<b>30958</b>	<b>30510</b>		
3	Klaten	Kemalang	13 desa	36997	36997		
			Manisrenggo	16 desa	40612	40612	
		Karangnongko	14 desa	32714	32714		
		Jatinom	18 desa	55363	55363		
		<b>Total penduduk terdampak Kabupaten Klaten</b>				<b>165686</b>	<b>165686</b>

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Jiwa Desa	Jumlah Jiwa Terdampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Keseluruhan Penduduk Terdampak Bencana</b>				<b>219847</b>	<b>214159</b>

Sumber : Renkon Erupsi Gunung Merapi dan Data BPS Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten

b. Kawasan Rawan Bencana (KRB) II

Kawasan Rawan Bencana II terdiri atas 2 bagian yaitu kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar dan kawasan yang berpotensi terlanda lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar). Di KRB II ini masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTK) sampai daerah ini dinyatakan aman kembali.

c. Kawasan Rawan Bencana (KRB) I

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap banjir lahar hujan Merapi dan kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas. Banjir lahar hujan melalui sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi.

Dalam buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2016 disebutkan bahwa 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Magelang, Kab. Boyolali dan Kab. Klaten masuk kategori risiko.

## 1.2. Penilaian Bahaya

Penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1) Mengacu pada rencana penanggulangan bencana provinsi Jawa Tengah tahun 2014 bahwa Gunung Merapi dikategorikan sebagai gunung api aktif; 2) Mengacu pada buku Risiko Bencana Indonesia tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten masuk dalam risiko sedang hingga tinggi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi; 3) Mengacu pada dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 bahwa Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten termasuk kawasan rawan terhadap bahaya primer

erupsi Gunung Merapi. Mengacu pada dokumen tersebut, maka disusunlah rencana kontingensi erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah ini.

Selain itu, mengacu pada aktivitas Gunung Merapi sejak 2016, maka penilaian bahaya erupsi Gunung Merapi dapat ditentukan dengan memperhatikan tipe letusan dengan kondisi sebagai berikut :

- 1) *Ekplosif* : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu dan kerikil perkiraan luasan ancaman hujan abu mencapai puluhan kilometer dan lontaran batu dan kerikil sejauh < 3 kilometer;
- 2) *Efusif* : pembentukan kubah lava, jenis ancaman yang ditimbulkan hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan surge. Awan panas akan meluncur sampai jarak 6 – 12 kilometer dari puncak;
- 3) *Efusif/eksplosif* : jenis ancaman yang ditimbulkan adalah hujan abu, kerikil, awan panas guguran dan awan panas letusan. Ancaman yang ditimbulkan adalah luncuran awan panas hingga mencapai 17 kilometer dari puncak.

### **1.3. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak**

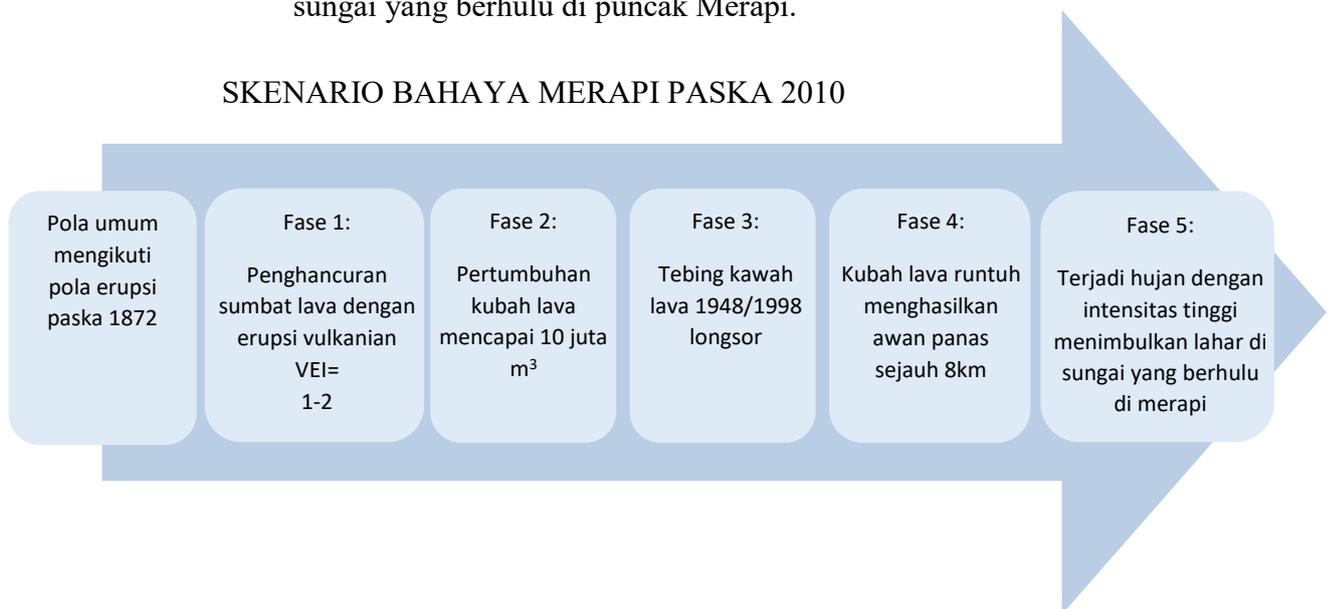
#### **1.3.1. Penentuan kejadian**

Penentuan kejadian ditetapkan berdasarkan masukan para ahli dari kantor BPPTKG di Yogyakarta. Menurut perhitungan dan analisa para ahli dapat dijelaskan bahwa dengan mengacu pada erupsi Merapi 2010 dapat digambarkan fase-fase yang dialami Merapi sebagai berikut :

- 1) Pola umum mengikuti pola erupsi pasca letusan 1872 dengan tipe “Merapi”;
- 2) Fase 1: Penghancuran sumbat lava dengan erupsi vulkanian VEI= 1-2 yang diawali dengan letusan cenderung eksplosif dengan ketinggian kurang lebih 1,5 km dan jatuhan material di seputar area puncak Merapi hingga radius 3 km ke segala arah. Sementara abu vulkanik diperkirakan mengarah ke barat dan ke timur sesuai dengan pola hembusan angin;
- 3) Fase 2: Pertumbuhan kubah lava mencapai 10 juta m<sup>3</sup> yang merupakan pertanda letusan tipe “Merapi”;

- 4) Fase 3: Tebing kawah lava 1948/1998 longsor sebagai akibat pembentukan kubah lava yang terus meningkat;
- 5) Fase 4: Kubah lava runtuh menghasilkan awanpanas sejauh 8 km diperkirakan meluncur ke beberapa arah yaitu tenggara selatan (sedikit) barat hingga barat laut dengan konsentrasi di aliran sungai Gendol dan sungai Lamat, sungai Senowo, Trising dan sungai Apu;
- 6) Fase 5: Terjadi hujan dengan intensitas tinggi menimbulkan lahar di sungai yang berhulu di Merapi sehingga perlu diwaspadai semua aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi.

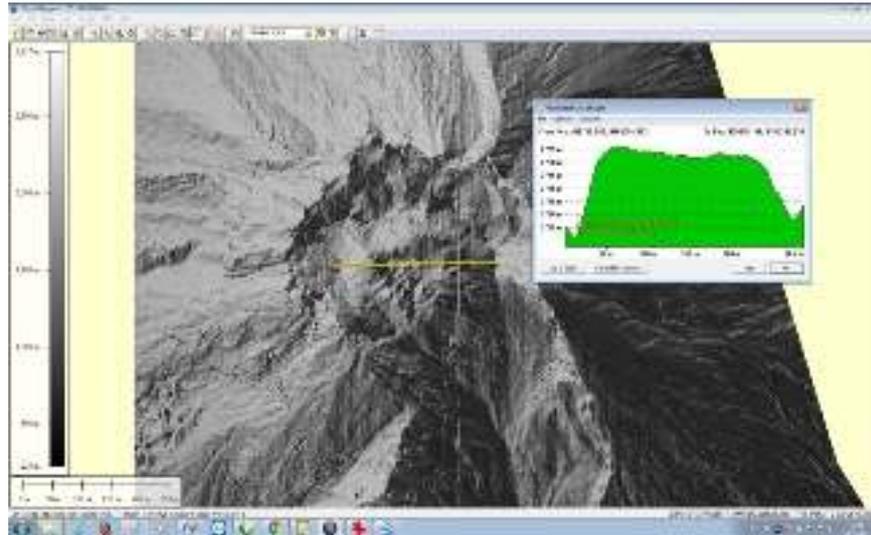
#### SKENARIO BAHAYA MERAPI PASKA 2010



Mendasarkan pada informasi aktivitas Gunung Merapi sejak tahun 2016 dan fase fase tersebut, maka didalam rencana kontingensi ini ditetapkan kejadian erupsi Gunung Merapi diskenariokan bulan Oktober 2017.

#### 1.3.2. Pengembangan skenario kejadian

- 1) Pada tanggal 21 September 2017 BPPTKG meningkatkan status Merapi menjadi “Siaga” (Level III) untuk Daerah KRB III. Merapi menunjukkan peningkatan aktifitas seismik, yaitu gempa fase banyak dengan 38 kejadian/hari, gempa vulkanik 11 kejadian/hari terjadi adanya penghancuran sumbatan lava dengan erupsi vulkanian VEI=1-2.



- 2) Pada 23 Oktober 2017 status Merapi ditetapkan 'Awat' (Level IV), dengan kondisi akan segera meletus, ataupun keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Aktivitas yang teramati secara visual yaitu, adanya longsoran tebing pertumbuhan kubah lava mencapai 10.000.000 m<sup>3</sup>, tanpa api diam, dan tanpa lava pijar guguran-guguran besar. Sedangkan seismisitasnya meningkat menjadi 588 kejadian/hari Gempa Fase Banyak, 80 kejadian/hari Gempa Vulkanik, 194 kejadian/hari Gempa Guguran, dengan laju deformasi 42 cm/hari. Radius aman ditetapkan di luar 10 km dari puncak Merapi.
- 3) Pada 26 Oktober 2017 pukul 00:30 WIB terjadi letusan pertama. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Pada tanggal 27 Oktober 2017 terjadi rentetan runtuhnya kubah lava yang menghasilkan awan panas sejauh 10 km. Melalui pengukuran dengan mini DOAS (*Diferensial Optical Absorption Spectroscopy*/Alat Ukur Emisi Sulfur Dioksida SO<sub>2</sub>) diketahui bahwa terjadi peningkatan fluks SO<sub>2</sub> yang mencapai 500 ton/hari. Pada pukul 16:05 ditetapkan radius aman di luar 10 km dari puncak Merapi.

### 1.3.3. Pengembangan skenario dampak

Pengembangan skenario dampak bencana erupsi Gunung Merapi meliputi beberapa aspek yaitu :

Tabel 2. Dampak Erupsi Gunung Merapi pada Daerah Terdampak

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aspek kependudukan	Penduduk	17963	30510	165686	lama pengungsian 1- 2 bulan
2	Aspek sarana dan prasarana	Jalan	79,7	15	73	km
		Jembatan	33	-	-	unit
		Cek DAM	5	-	-	buah
		Sabo DAM	-	-	3	buah
		Embung	-	-	1	buah
		Jaringan listrik	19	15 (terganggu selama 30 hari)	13 (terganggu selama 30 hari)	desa
		Jaringan air bersih	10 (desa)	7 (terganggu selama 30 hari)	61 (terganggu selama 30 hari)	unit
		Sekolah :				
		- SD	18	17	67	SD
		- SMP/Mts	4	16	(Terganggu selama 30 hari)	SMP dan Mts
		- SMA/MA/SMK	-	7		SMA, MA, dan SMK
		Sarana kesehatan :				
		- Puskesmas	10	4 (terganggu selama 30 hari)	7 Terganggu selama 30 hari	Tempat
		- Rumah sakit	Terganggu selama 30 hari	Terganggu selama 30 hari	1 (terganggu selama 30 hari)	unit
3	Aspek sosial ekonomi	Pasar	10	7 (terganggu selama 30 hari)	4 (terganggu selama 30 hari)	tempat
		Tempat usaha/pertokoan	-	7 (terganggu selama 30 hari)	712 (terganggu selama 30 hari)	unit
		UMKM	-	70	-	unit
		Tempat pariwisata	-	-	4	destinasi
		Hotel	-	3	-	tempat
		Homestay	-	100	-	tempat
		Losmen	-	3	-	tempat
		Sawah	-	9977	15 %	ha

No.	Aspek Terdampak	Objek/Sarana Terdampak	Jumlah			Keterangan	
			Kab. Magelang	Kab. Boyolali	Kab. Klaten		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				(terganggu selama 60 hari)	(terganggu selama 30 hari)		
		Tegalan/Kebun	-	9887	-	ha	
		Perikanan	-		-		
		Peternakan	7570 (Kambing dan sapi)	15048 (terganggu selama 60 hari)	43844	Sapi potong, sapi perah, kuda, domba, babi, dan kelinci	
4	Aspek pemerintahan	Kantor desa/ kantor pemerintahan	10 (terganggu selama 30 hari)	11 (terganggu selama 30 hari)	65 (terganggu selama 30 hari)	unit	
5	Aspek lingkungan			5126,01	Kawasan hutan terbakar akibat awan panas		
		Kehutanan	-			ha	
		Perkebunan	-		10490	Perkebunan terancam terbakar	ha
		Cagar budaya	-		4	Seluruh populasi dalam kawasan lindung terancam awan panas	buah
		Mata air	-		1735,5	Pencemaran air oleh abu vulkanik	ha
		Suaka alam	-		2546,2	-	ha

## BAB II. TUGAS POKOK

---

### 2.1. Aktivasi Rencana Kontingensi

Transformasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi dilaksanakan setelah terjadi tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana Erupsi Gunung Merapi dari hasil kajian lembaga teknis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada saat status "Siaga Merapi".

### 2.2. Tujuan dan Strategi

#### 2.2.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan strategi penanganan darurat memprioritaskan pada penyelamatan jiwa dan perbaikan prasarana/sarana vital guna berfungsinya kembali pelayanan publik secepatnya. Tujuan dan strategi mencakup aspek-aspek durasi penanganan darurat, kelompok rentan, kebutuhan dasar, kesehatan, sosial, penyelamatan jiwa, manajemen penanganan darurat. Dalam situasi kedaruratan, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan penanganan darurat. Pentingnya melaksanakan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Pelaksanaan kebijakan dan strategi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kedaruratan dimana tujuan rencana operasi dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

#### 2.2.2. Strategi

Rencana Operasi sebagai rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana, disusun oleh satuan tugas Komando Penanganan Darurat Bencana dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat (*Perka BNPB Nomor 03 tahun 2016 tentang*

*Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - SKPDB*). Kebijakan dan strategi pada saat tanggap darurat juga harus ditetapkan termasuk tata cara pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi :

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan dasar termasuk manajemen logistik dan peralatan;
2. Penetapan tugas secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana;
3. Terpenuhi prinsip-prinsip pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penetapan aktor-aktor yang bertanggungjawab di dalam keadaan darurat

Aspek penting dalam penetapan kebijakan dan strategi terkait dengan penentuan masa penanganan darurat dan mekanisme operasi kedaruratan yang meliputi:

1. Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status peringatan dini, siaga darurat, dan tanggap darurat serta transisi darurat ke pemulihan beserta kegiatannya;
2. Dasar penentuan status di dalam keadaan darurat;
3. Pemicu dan jangka waktu masing-masing status dalam keadaan darurat untuk setiap skenario dan jenis bencana;
4. Mekanisme aktivasi rencana operasi penanganan darurat bencana.

Beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi dalam situasi darurat bencana antara lain :

1. Kesiapan kurang sempurna/tidak ada;
2. Peringatan dini tidak ada atau kurang efektif;
3. Informasi tidak lengkap/tidak tepat, membingungkan;
4. Komunikasi/ transportasi terputus;
5. Kebingungan, *chaos*, krisis, gagal kordinasi;
6. Kebutuhan besar, bahan bantuan tidak mencukupi;
7. Lingkup terlalu besar/meluas;
8. Sasaran yang tidak jelas;
9. Masalah keamanan dan jaminan perlindungan;
10. Terlalu banyak tugas, waktu terlalu sempit;
11. Banyak yang terlibat, koordinasi sangat kompleks;

12. Hambatan politis, administratif dan birokratis.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu menetapkan kebijakan yang mampu menjalankan fungsi manajemen dengan baik sekaligus dapat mengurangi risiko bencana. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam strategi tindakan yang tepat dan segera sekaligus menuntut tanggapan dan cara penanganan yang luar biasa (diluar prosedur rutin/standar). Seluruh tindakan tersebut harus bertujuan untuk :

1. Mengurangi jumlah korban;
2. Meringankan penderitaan;
3. Stabilisasi kondisi korban/pengungsi;
4. Mengamankan aset;
5. Memulihkan fasilitas kunci atau vital;
6. Mencegah kerusakan lebih jauh;
7. Menyediakan pelayanan dasar dalam penanganan pasca darurat.

Di sisi lain, dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos Lapangan penanganan darurat bencana juga dibentuk di tingkat yang lebih kecil yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat bencana. Peran dari Pos Lapangan tersebut adalah :

1. Meminimalkan risiko kerusakan dan kerugian;
2. Memberikan perlindungan, perhatian khusus pada kelompok rentan (Perka BNPB Nomor 14 tahun 2014);
3. Memberikan perlindungan dan penyelamatan kepada masyarakat sesuai skala prioritas dan non diskriminatif;
4. Penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana;
5. Memberdayakan segenap potensi yang ada dan menghindari terjadinya egosektoral;
6. Menjamin pelayanan publik untuk tetap berfungsi.

Arah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung hal-hal diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kebijakan dan Strategi yang Dilakukan

No	Kebijakan	Strategi
1	Meminimalkan kerusakan dan kerugian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Pos Komando sebagai fungsi manajemen dan koordinasi penanganan bencana (BPBD), dan juga sebagai pengendali operasi</li> <li>- Mengidentifikasi dampak dan potensi kerusakan yang ditimbulkan</li> <li>- Menjamin pelayanan logistik dengan memberdayakan sumber daya provinsi maupun kabupaten disekitar 3 kabupaten terdampak langsung,</li> <li>- Menjamin pelayanan publik tetap berfungsi termasuk didalamnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan dengan mendirikan pos-pos layanan.</li> </ul>
2	Penanganan bencana alam berbasis komunitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi dan mengelola jenis-jenis potensi yang berbasis komunitas,</li> <li>- Mengoperasionalkan desa paseduluran (<i>sister village</i>) dan paseduluran disabilitas</li> <li>- Memberdayakan penyintas untuk melakukan kegiatan ekonomi</li> </ul>
3	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara realistis dan bermartabat serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan (Perka BNPB No. 14 Tahun 2014, pasal 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai kebijakan dalam penanganan bencana termasuk etika berinteraksi</li> <li>- Memastikan kebutuhan dasar pengungsi (pasokan air bersih dan sanitasi, makanan, bantuan non pangan, kesehatan, hunian sementara, sarana dan prasarana lainnya) terpenuhi secara inklusibekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan antar wilayah</li> </ul>
4	Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat sesuai skala prioritas secara non diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendirikan pos pengaduan layanan</li> <li>- Memastikan keamanan dan keselamatan selama tanggap darurat baik pada manusia, asset dan aksesnya</li> </ul>

Berdasarkan pada hal-hal tersebut dan memperhatikan kapasitas 3 kabupaten terdampak, maka penetapan kebijakan dan strategi Penanganan Darurat Bencana disepakati membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana berada ditingkat Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana (PDB) Erupsi Gunung Merapi.

## BAB III. PELAKSANAAN

---

### 3.1. Konsep Operasi

Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 4 klaster dalam melaksanakan penanganan penanggulangan kedaruratan bencana. Perencanaan Klaster (Bidang) disusun agar tujuan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi dapat melindungi segenap masyarakat. Pengembangan Struktur dan Klaster dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan darurat bencana Pos Pendamping, dengan melakukan kajian terhadap tingkatan ancaman dan kerentanan, prinsip evakuasi pengungsian untuk perlindungan masyarakat dan akan menata kembali kehidupan setelah terjadi bencana.

Perencanaan klaster di tingkat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan kedudukannya sebagai Pos Pendamping dengan struktur sebagaimana terlampir. Adapun klaster Pos Pendamping sebagai berikut :

- 1) Klaster Penyelamatan dan Evakuasi;
- 2) Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian;
- 3) Klaster Kesehatan;
- 4) Klaster Logistik dan Dapur Umum.

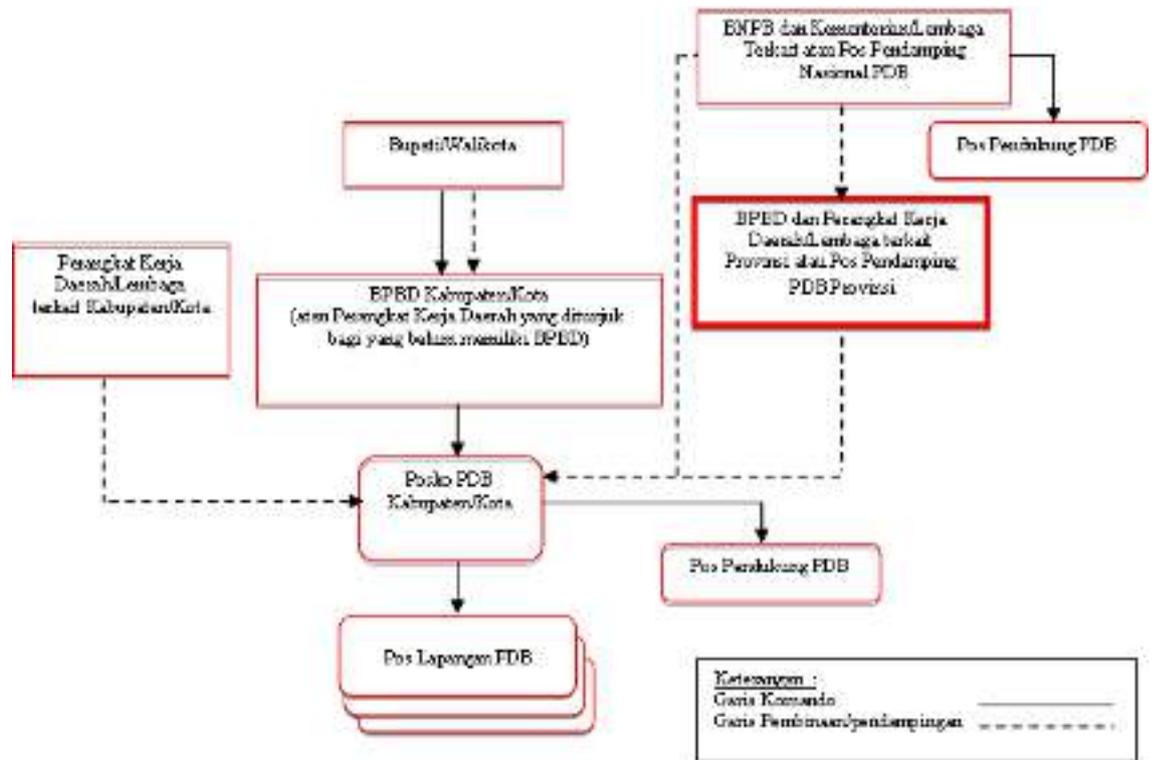
#### 3.1.1. Mekanisme pelaksanaan

- 1) BPBD Kabupaten terdampak sesuai kewenangannya menginisiasi dan memimpin penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melakukan rapat koordinasi untuk aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan setempat. Agenda utama rapat koordinasi dimaksud adalah membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Kabupaten yang berperan sebagai pengendali operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Posko PDB yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota kabupaten atau di wilayah lain dalam kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
- 3) Posko PDB Kabupaten terdampak berwenang membentuk Pos Lapangan PDB yang berperan sebagai pelaksana operasi di lapangan. Pos Lapangan PDB dapat

didirikan di lokasi bencana, disekitar lokasi bencana dan lokasi pengungsian dengan jumlah Pos tergantung kebutuhan penanganan darurat bencana.

- 4) Posko PDB Kabupaten terdampak dapat membentuk Pos Lapangan di bawah kendali Posko PDB Kabupaten bersangkutan.
- 5) BPBD Kabupaten secara hirarki bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
- 6) Perangkat kerja daerah/lembaga terkait Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Posko PDB Kabupaten.
- 7) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pembinaan kepada BPBD Kabupaten terkait upaya penanganan darurat bencana.
- 8) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui koordinasi BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan perangkat kerja daerah/lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 9) Pemerintah Provinsi jika diperlukan terkait pelaksanaan pendampingan penanganan darurat bencana dapat membentuk Pos Pendamping PDB Provinsi.
- 10) Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dapat berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain dalam provinsi dengan pertimbangan efektivitas penanganan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana.
- 11) Pemerintah melalui koordinasi BNPB dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional dapat melakukan pembinaan dan pendampingan bantuan sumber daya termasuk teknis penanganan kepada pemerintah provinsi dan Posko PDB kabupaten terdampak bilamana diperlukan.
- 12) Jika Pos Pendamping PDB provinsi memerlukan Pos Pendukung PDB nasional yang dapat membantu akses bantuan darurat bencana yang berasal dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional, maka dapat membentuk Pos Pendukung PDB atau memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak. Jika memanfaatkan Pos Pendukung PDB yang dimiliki Posko PDB Kabupaten terdampak maka

pengendalian pengelolaan akses bantuan yang bersumber dari sumber daya tingkat nasional dan komunitas internasional tetap menjadi tanggungjawab Pos Pendukung PDB nasional.

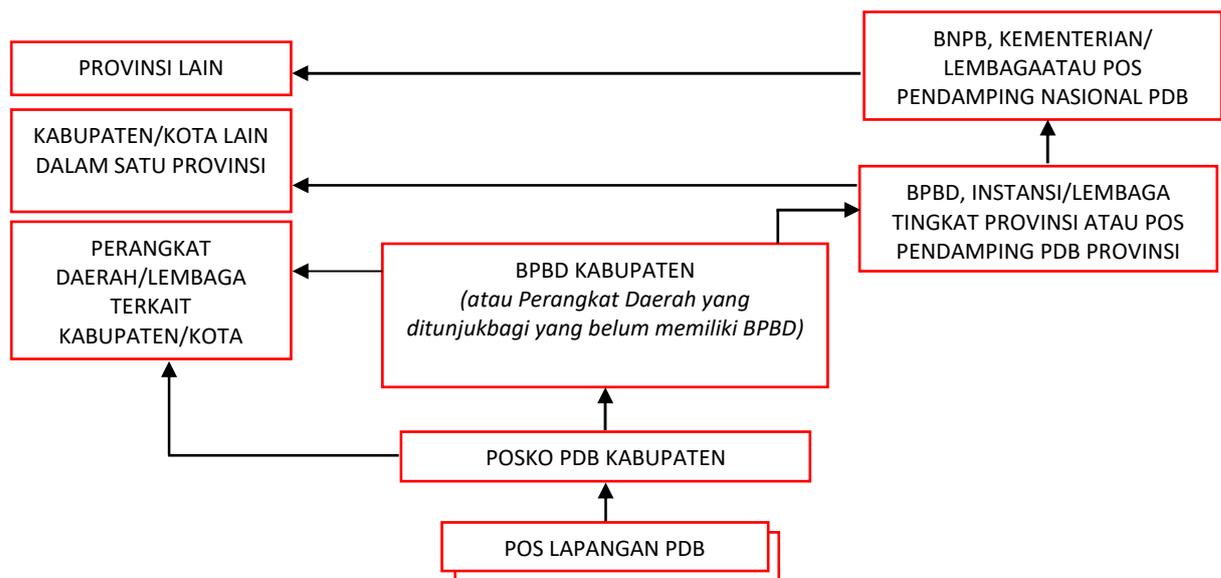


Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan pos pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah

### 3.1.2. Mekanisme permintaan bantuan

- 1) Permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dimintakan seperti formulir dibawah.
- 2) Pos Lapangan PDB mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Komandan Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BPBD maupun satuan kerja perangkat daerah/lembaga terkait di Kabupatenbersangkutan dengan mengoordinasikan permintaan bantuan sumber daya tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko PDB Kabupaten.
- 4) Bila kebutuhan sumber daya tidak dapat dipenuhi di tingkat kabupaten, maka Posko PDB Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi melalui BPBD Kabupaten.

- 5) BPBD Provinsi berkewajiban untuk memenuhi permintaan bantuan sumber daya dimaksud dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan mobilisasi bantuan sumber daya ke Kabupaten/Kota lain yang tidak terdampak yang masih dalam satu wilayah kerja provinsi dan memiliki kemampuan untuk membantu.
- 6) Bila permintaan bantuan sumber daya belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari sumber daya provinsi dan kabupaten/kota lain yang tidak terdampak, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB.
- 7) BNPB berkewajiban untuk memenuhi permintaan sumber daya bantuan yang diperlukan dan dimungkinkan untuk meneruskan permintaan bantuan sumber daya dimaksud ke provinsi lain yang memiliki kemampuan untuk membantu.
- 8) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka BPBD Kabupatendapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping PDB Provinsi.
- 9) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi tidak dapat memenuhi permintaan bantuan sumber daya, maka Pos Pendamping PDB Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.
- 10) Bila Pos Pendamping Nasional PDB dibentuk, maka BPBD Provinsi dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendukung Nasional PDB.

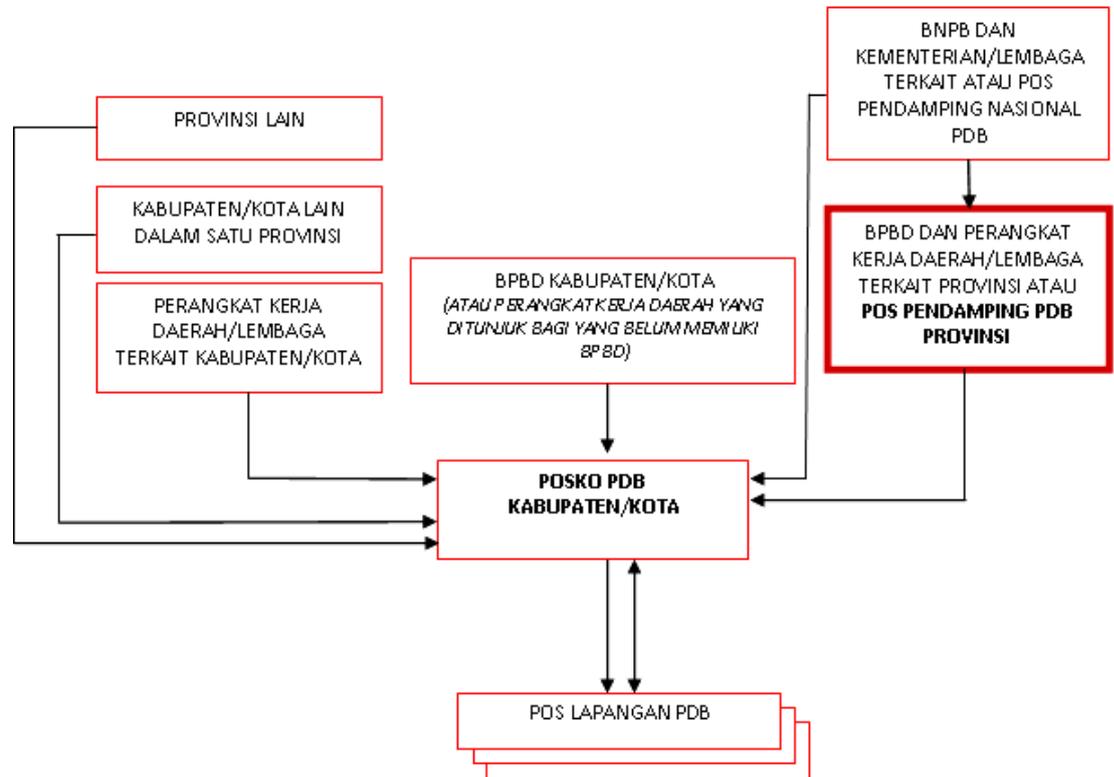


Gambar 2. Mekanisme permintaan bantuan

### **3.1.3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya**

- 1) Posko PDB Kabupaten memobilisasi dan mendistribusikan bantuan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan operasi lapangan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh Pos Lapangan PDB.
- 2) BPBD dan perangkat kerja daerah/lembaga terkait di Kabupaten bersangkutan memobilisasi bantuan sumber daya yang diminta oleh Posko PDB Kabupaten.
- 3) Bila kebutuhan sumber daya tidak dapat terpenuhi pada tingkat Kabupaten terdampak, maka BPBD Kabupaten/Kota lain dalam satu wilayah provinsi dapat memobilisasi bantuan langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BPBD Provinsi bersangkutan.
- 4) Bila jarak Pos Lapangan PDB berlokasi lebih dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang akan memberikan bantuan dibanding jarak dari Posko PDB, maka BPBD Kabupaten/kota lain tersebut dapat langsung menyerahkan bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB dimaksud atas petunjuk dari Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 5) Bila ada kebutuhan penanganan darurat bencana yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi bersangkutan, maka BNPB dapat memobilisasi bantuan di tingkat nasional untuk mendukung penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh Posko PDB Kabupaten terdampak, dengan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Bila kebutuhan sumber daya belum dapat terpenuhi dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jawa Tengah, maka BPBD Provinsi lainnya (termasuk BPBD Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya) dapat pula memobilisasi bantuan sumber daya kepada Posko PDB Kabupaten terdampak di bawah koordinasi BNPB.
- 7) Bila Pos Pendamping PDB Provinsi dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dapat dilakukan oleh Pos Pendamping PDB Provinsi ke Posko PDB Kabupaten terdampak.
- 8) Bila Pos Pendukung Nasional PDB dibentuk, maka mobilisasi bantuan sumber daya dapat dilakukan oleh Pos Pendukung Nasional melalui Pos Pendamping Provinsi PDB atau langsung ke Posko PDB Kabupaten terdampak dengan pertimbangan efektifitas dan tembusan dokumen pengiriman kepada BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB yang bersangkutan.

- 9) Pos Pendukung PDB yang di bentuk oleh BNPB dapat memobilisasi bantuan darurat bencana yang diterimanya ke Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah.

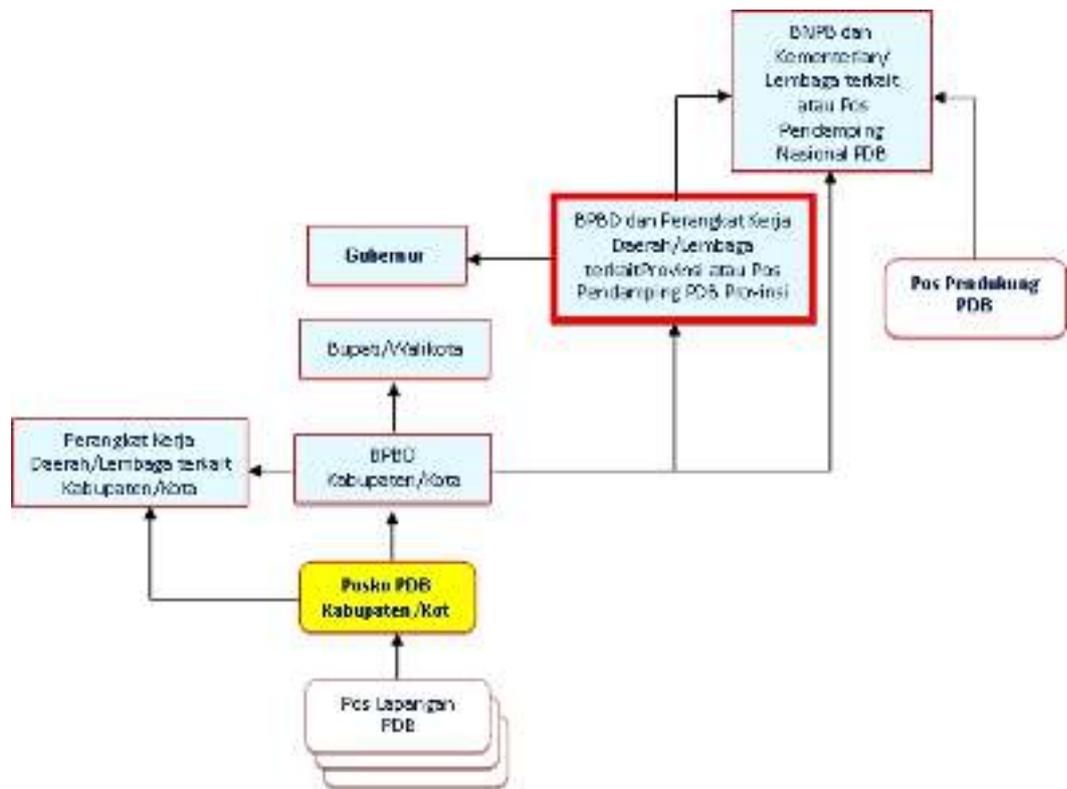


Gambar 3. Mekanisme mobilisasi dan distribusi bantuan sumber daya

#### 3.1.4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

- 1) Pos Lapangan PDB mengumpulkan data dan Informasi terkait perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana yang dilakukan di wilayah kerjanya.
- 2) Pos Lapangan PDB berkewajiban menyampaikan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Posko PDB Kabupaten.
- 3) Bagian Pengelolaan Data, Informasi, dan Komunikasi pada Posko PDB Kabupaten berkewajiban untuk membuat data salinan dari seluruh informasi yang disampaikan oleh Pos Lapangan PDB.
- 4) Komandan Posko PDB Kabupaten berwenang untuk mengeluarkan informasi ke publik dan media masa.

- 5) Posko PDB Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Kabupaten dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten.
- 6) BPBD Kabupaten berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait di tingkat kabupaten, BPBD Provinsi/Pos Pendamping Provinsi PDB, dan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.
- 7) Pos Pendamping PDB Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang pelaksanaan pendampingan operasi penanganan darurat bencana kepada BPBD Provinsi dengan tembusan kepada perangkat kerja daerah/lembaga terkait Provinsi dan BNPB.
- 8) BPBD Provinsi berkewajiban menyampaikan informasi dan laporan (laporan harian, tertentu, dan akhir kegiatan) sesuai kebutuhan tentang perkembangan situasi dan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana serta pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan BNPB/Pos Pendukung Nasional PDB.



Gambar 4. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan

## 3.2. Fungsi

### 3.2.1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan adanya kesatuan Pos Komando PDB di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten yang terarah, terpadu, terukur, dan terbangun antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi;
- 2) Memastikan adanya pola koordinasi multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi;
- 3) Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi terpadu.

### 3.2.2. Perencanaan

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan pelaksanaan operasi penanganan darurat terukur, terpadu, dan terarah berdasarkan tujuan dan strategi dengan perencanaan yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan adanya pelaksanaan operasi penanganan darurat dengan mempertimbangkan skala prioritas penanganan;

- 3) Memastikan adanya penetapan rencana operasi dan perintah operasi harian oleh komandan penanganan darurat bencana bersama pihak-pihak terkait dalam penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi.

### **3.2.3. Operasi**

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan tercapainya tujuan dan strategi yang telah ditentukan dalam operasi penanganan darurat bencana secara terpadu;
- 2) Memastikan semua tindakan operasi berjalan secara efektif dan efisien.

### **3.2.4. Logistik**

Memberikan pendampingan berupa:

- 1) Memastikan adanya dukungan logistik pangan yang dikelola pihak terkait dalam penanganan darurat bencana;
- 2) Memastikan adanya dukungan logistik peralatan komunikasi dan transportasi dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana;
- 3) Memastikan adanya dukungan logistik sarana pergudangan dari pihak terkait dalam penanganan darurat bencana.

### **3.2.5. Administrasi dan keuangan**

- 1) Memastikan adanya sumber pembiayaan operasi penanganan darurat;
- 2) Memastikan adanya mekanisme penerimaan dan penggunaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Masyarakat, maupun sumbangan dari pihak lainnya;
- 3) Memastikan adanya mekanisme pelaporan secara efisien dan efektif.

## **3.3. Tugas-Tugas**

Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas-tugas yang mencakup :

- 1) Klaster Penyelamatan dan Evakuasi

Kegiatan klaster penyelamatan dan evakuasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi.
- b. Mengkoordinasikan kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi.

- c. Mengakordinasikan dan memobilisasi kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- d. Melakukan mobilisasi potensi sumberdaya yang dibutuhkan.
- e. Melakukan persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya.
- f. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Sasaran klaster penyelamatan dan evakuasi diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pertemuan koordinasi antar pelaku klaster penyelamatan dan evakuasi.
- b. Terpenuhinya kebutuhan personil penyelamatan dan evakuasi di 3 Kabupaten.
- c. Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung penyelamatan dan evakuasi di 3 kabupaten.
- d. Terlaksananya mobilisasi potensi sumberdaya yang dibutuhkan.
- e. Terlaksananya persiapan peralatan operasi dan sarana penunjang lainnya.
- f. Terlaksananya operasi penyelamatan dan evakuasi warga terdampak.
- g. Tersusunnya laporan pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi.

Dalam proses penyelamatan dan evakuasi, keberadaan desa-desa paseduluran ikut berperan penting. Adapun desa-desa paseduluran per kabupaten yang terdampak sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Sister Village dan Kapasitas TEA nya

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa)
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	Ngluwar	Jamus kauman	4300
					Pekunden	
					Bligo	
			Nglumut	Salam	Sucen	525
					Ngargosoko	Salam
			Seloboro			
			Ngablak	Srumbung	Kradenan	2320
					Ngluwar	
					Mungkid	
			Srumbung	Ngluwar	Baturono	1750
Tersangede						

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa)	
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Mranggen	Muntilan	Gunungpring Sokorini	3090	
			Tegalrandu	Srumbung	Bringin	3500	
				Pabelan	Pabelan		
				Wanurejo	Wanurejo		
			Kemiren	Salam	Salam	1500	
			Dukun	Ngargomulyo	Muntilan	Taman agung	2670
				Kalibening	Muntilan	Adikarto	1700
					Muntilan	Tanjung	
				Keningar		-	-
				Sengi	Sawangan	Jati	5500
		Sawangan			Tirtosari		
		Kaliangkrik			Butuh		
		Mungkid			Senden		
		Mungkid			Treko		
		Sumber		Muntilan	Pucungrejo	2000	
			Muntilan	Sedayu			
		Krinjing		-	-		
		Paten	Mungkid	Gondang	5086		
			Mungkid	Paremono			
			Mungkid	Bumirejo			
			Mertoyudan	Banyurono			
			Mertoyudan	Mertoyudan			
		Mangunsoko		-	-		
Dukun		-	-				
Sewukan	Mungkid	Ambartawang	4000				
	Mungkid	Rambeanak					
	Mungkid	Mungkid					
Sawangan	Wonolele	Sawangan	Banyuroto	2500			
		Pakis	Pogalan				
	Ketep	Sawangan	Wulunggunung	2550			
		Sawangan	Podosoko				
	Pakis	Ketundan					
Kapuhan	Sawangan	Mangunsari	3000				
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	Mungkid	Bumirejo	-	
			Klakah	Sawangan	Gantang	-	
			Lencoh	Ampel	Kembang	-	
			Jrakah	Boyolali Kota	Karanggeneng	-	
			Samiran	Boyolali Kota	Mudal	-	
		Musuk	Mriyan	Boyolali Kota	Kiringan	-	
			Cluntang	Boyolali Kota	Siswodipuran	-	

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa Asal	Sister Village		Kapasitas TEA (jiwa)
				Kecamatan	Desa/ Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Sumur	Mojosongo	Kemiri	-
		Cepogo	Gedangan	Boyolali Kota	Pulisen	-
			Genting	Mojosongo	Kemiri	-
3	Klaten	Kemalang (13 desa)	Balerante	Prambanan	Kebondalem lor	1000
			Sidorejo	Kebonarum	Menden	1000
			Tegal mulyo	Karangnongko	Demak Ijo	1000
				Delanggu	Gatak	1000
				Karangnongko	Kanoman	1000
			Bawukan	Prambanan	Brajan	2000
				Kebonarum	Menden	1000
				Karangnongko	Somokaton	2000
				Kebonarum	Karangduren	2000
				Ngawen	Manjung	2000
				Kebonarum	Basin	2000
				Kebonarum	Pluneng	2000
			Panggang	Karangnongko	Banyuaneng	2000
		Prambanan		Joho	2000	
		Manisrenggo	Prambanan	Randusari	2000	
			Prambanan	Bugisan	2000	
16 desa						
Karangnongko	14 desa					
Jatinom	18 desa					
<b>Total Keseluruhan</b>						<b>74.591</b>

## 2) Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian

Kegiatan klaster sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian.
- b. Memobilisasi kebutuhan sarana dan Prasarana Pengungsian dari lembaga/ instansi tingkat Provinsi.
- c. Mengkoordinasikan tempat pengungsian, termasuk sarana penerangan.
- d. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Sasaran klaster sarana dan prasarana pengungsian diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian.

b. Tersedianya tempat pengungsian.

Adapun lokasi-lokasi tempat pengungsian dan kapasitasnya di setiap kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5. Lokasi Pengungsian Warga dan Kapasitasnya per Kabupaten

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lokasi Pengungsian	Kapasitas (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang	Srumbung	Kaliurang	-	-
			Nglumut	-	-
			Ngargosoko	-	-
			Ngablak	-	-
			Srumbung	-	-
			Mranggen	-	-
			Tegalrandu	-	-
			Kemiren	-	-
		Dukun	Ngargomulyo	-	-
			Kalibening	-	-
			Keningar	-	-
			Sengi	-	-
			Sumber	-	-
			Krinjing	-	-
			Paten	-	-
			Mangunsoko	-	-
		Sawangan	Dukun	-	-
			Sewukan	-	-
			Wonolele	-	-
			Ketep	-	-
			Kapuan	-	-
2	Boyolali	Selo	Tlogolele	-	-
			Klakah	Sirkuit Gokart	-
			Lencoh	Eks gedung IPHI	-
			Jrakah	Halaman BPDB Boyolali	-
			Samiran	Halaman Rumah Dinas Bupati Boyolali	-
		Musuk	Mriyan	Gelanggang Anuraga	-
			Cluntang	Gedung Mahesa	-
			Sumur	Alun-alun lor boyolali	-
		Cepogo	Gedangan	GOR Ponco Budoyo	-
			Genting	Alun-alun selatan boyolali	-
		3	Klaten	Kemalang (13 desa)	Balerante

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Lokasi Pengungsian	Kapasitas (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Sidorejo	Shelter Menden	1000
			Tegal mulyo	Shelter Demak Ijo	1000
			Kendalsari	GOR Gelar Sena	2000
			Bawukan	Komplek TNI Depowedi	2000
			Panggung	Pendopo Kabupaten Klaten	2000
		Manisrenggo	16 desa		
		Karangnongko	14 desa		
		Jatinom	18 desa		
<b>Total Keseluruhan</b>					<b>9000</b>

Note: Posisi lokasi dengan desa terdampak belum disesuaikan perlu konfirmasi ulang

Tabel 6. Jumlah Lokasi Pengungsian Hewan Ternak dan Kapasitasnya per Kabupaten

No.	Kabupaten	Jumlah Ternak	Tempat Pengungsian		Kapasitas
			Kecamatan	Lokasi Pengungsian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang	7570	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2	Boyolali	15048	Boyolali kota	Pasar Sapi Singkil	-
			Cepogo	Pasar Sapi Jelok	-
			Boyolali kota	Pasar Sapi Ampel	-
3	Klaten	43844	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>66462</b>			

- c. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
- d. Tersedianya sarana penerangan.
- e. Tersedianya tempat pembuangan sampah.
- f. Tersedianya sarana khusus bagi penyandang disabilitas.
- g. Tersedianya sarana untuk pelayanan publik.
- h. Tersedianya sarana komunikasi, informasi dan multimedia.

- i. Tersedianya sarana sosial dan psikososial.
- j. Tersedianya sarana belajar mengajar sementara.

### 3) Klaster Kesehatan

Kegiatan klaster kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah.
- b. Memobilisasi bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan kota.
- c. Mengkoordinasikan bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan baik dari RS swasta, klinik maupun lembaga kesehatan lainnya.
- d. Mengkoordinasikan RS Lapangan dan penanganan trauma healing oleh Persada Profesi Psikologi, Biro Psikologi Universitas dan profesi Psikolog lainnya.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- f. Menyusun laporan kegiatan layanan kesehatan.

Sasaran klaster kesehatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Kesehatan di masing-masing daerah.
- b. Terdistribusinya bantuan tenaga, peralatan dan obat-obatan.
- c. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, baik kelompok rentan maupun penyandang disabilitas.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.
- e. Tersusunnya laporan kegiatan layanan kesehatan.

### 4) Klaster Logistik dan Dapur Umum

Kegiatan klaster logistik dan dapur umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah.
- b. Memobilisasi kebutuhan logistik dan dapur umum di kabupaten kab/kota.
- c. Mengkoordinasikan bantuan kebutuhan dasar logistik dan dapur umum.
- d. Memberikan bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum.

f. Menyusun laporan kegiatan klaster logistik dan dapur umum.

Sasaran klaster logistik dan dapur umum diantaranya sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi antar pelaku di Klaster Logistik dan Dapur Umum di masing-masing daerah.
- b. Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar.
- c. Terpenuhinya bantuan peralatan sosial, pendidikan dan psikososial.
- d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan logistik dan dapur umum.
- e. Tersusunnya laporan kegiatan Klaster Logistik dan Dapur Umum.

### **3.4. Instruksi Koordinasi**

- 1) Penugasan Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah berlaku selama 14 hari operasi penanganan darurat bencana. Penugasan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Jika terjadi peningkatan aktivitas dan atau berpotensi terjadi erupsi Gunung Merapi maka penetapan status tanggap darurat segera ditetapkan dan Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah segera diaktivasi. Gubernur Jawa Tengah menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Koordinator sesuai struktur organisasi;
- 3) Penyusunan Rencana Operasi Pos Pendamping PDB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi dengan menyesuaikan perkembangan lapangan sesuai hasil kaji cepat dan data dari Pos Komando PDB Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 4) Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada ketiga kabupaten yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten tanpa mengambil alih operasi komando penanganan darurat bencana;
- 5) Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah harus menempatkan petugas dan atau relawan yang berasal dari instansi/lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah di lokasi yang telah ditentukan sebagai Pos Pendamping di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten selama 24 jam dan 14 hari;
- 6) Petugas dan atau relawan yang ditempatkan di Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah membuat laporan harian yang ditujukan kepada masing-masing Koordinator bidang operasi Pos Pendamping PDB provinsi Jawa Tengah;

## **BAB IV. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK**

---

### **4.1. Administrasi**

- 1) Pada awal kejadian bencana erupsi Gunung Merapi atau sebelum Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka seluruh sumberdaya lokal Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana, lembaga non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 2) Setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat menggunakan BANSOS/Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 3) Pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan pendampingan teknis, dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan lain yang diperlukan kepada Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh ketiga kabupaten sesuai dengan hasil kajian kebutuha;
- 4) Pemerintah pusat merapat dan memberikan pendampingan dan bantuan yang sifatnya ekstrim berupa sumberdaya yang tidak dimiliki dan tidak bisa diberikan oleh daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Jenis pendampingan yang diberikan mencakup kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP), pendampingan akses Belanja Tak Terduga (BTT), pendampingan administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel, dan pendampingan mobilisasi logistik, peralatan, serta dukungan komunikasi yang dibutuhkan daerah terdampak.

### **4.2. Logistik**

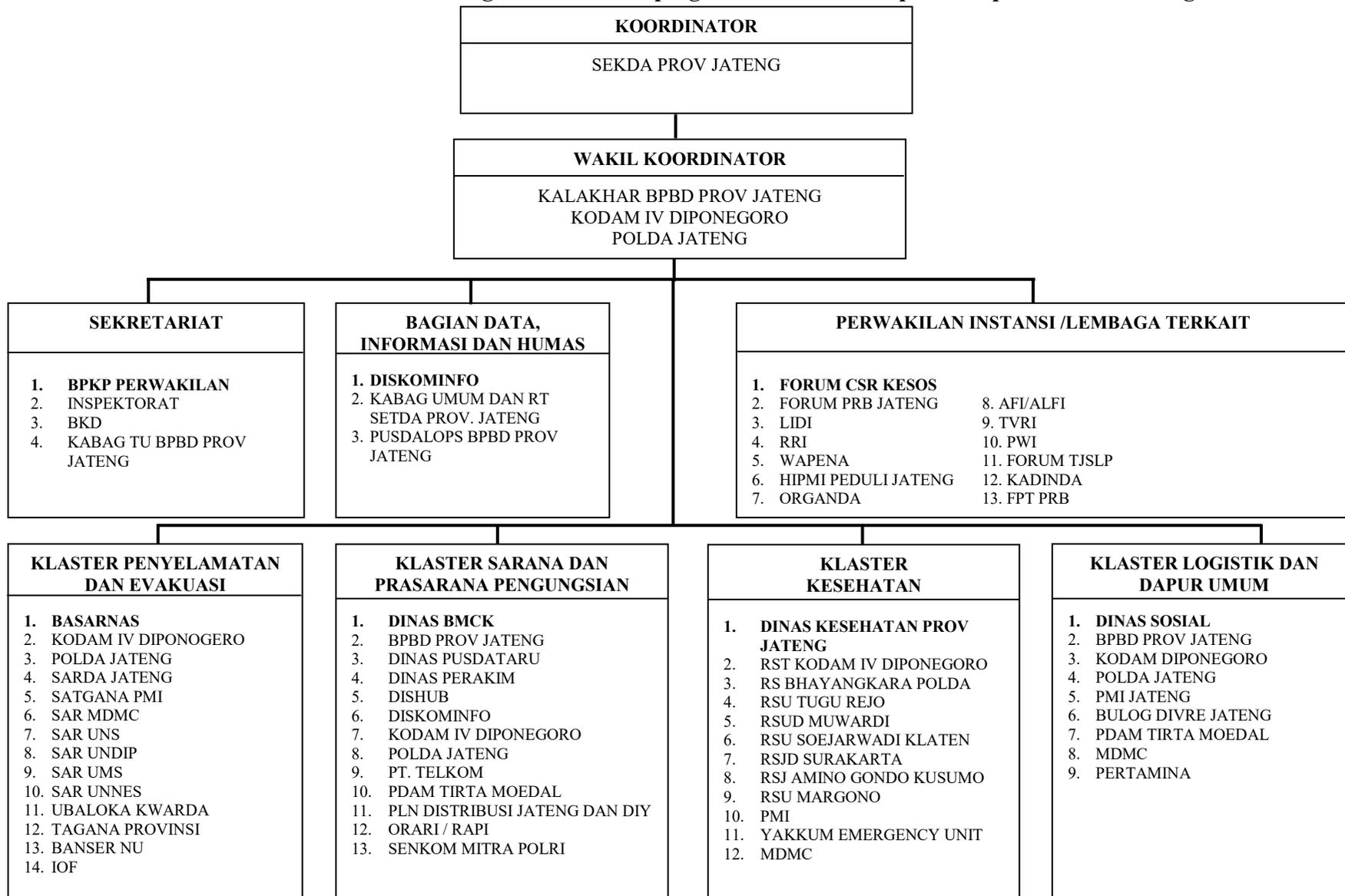
- 1) Pada awal kejadian bencana erupsi Gunung Merapi, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten dioptimalkan

baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat berupa personil, logistik dan peralatan;

- 2) Jika sumberdaya lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi;
- 3) Pemerintah Provinsi dapat menginformasikan pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk dapat membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten;
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dapat membantu penanganan darurat bencana dengan bantuan terkait: fasilitas personil, dana siap pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN-A: Struktur Koordinasi dengan Pos Pendamping PDB Bencana Erupsi Merapi Prov. Jawa Tengah



## LAMPIRAN-B: Susunan Tugas

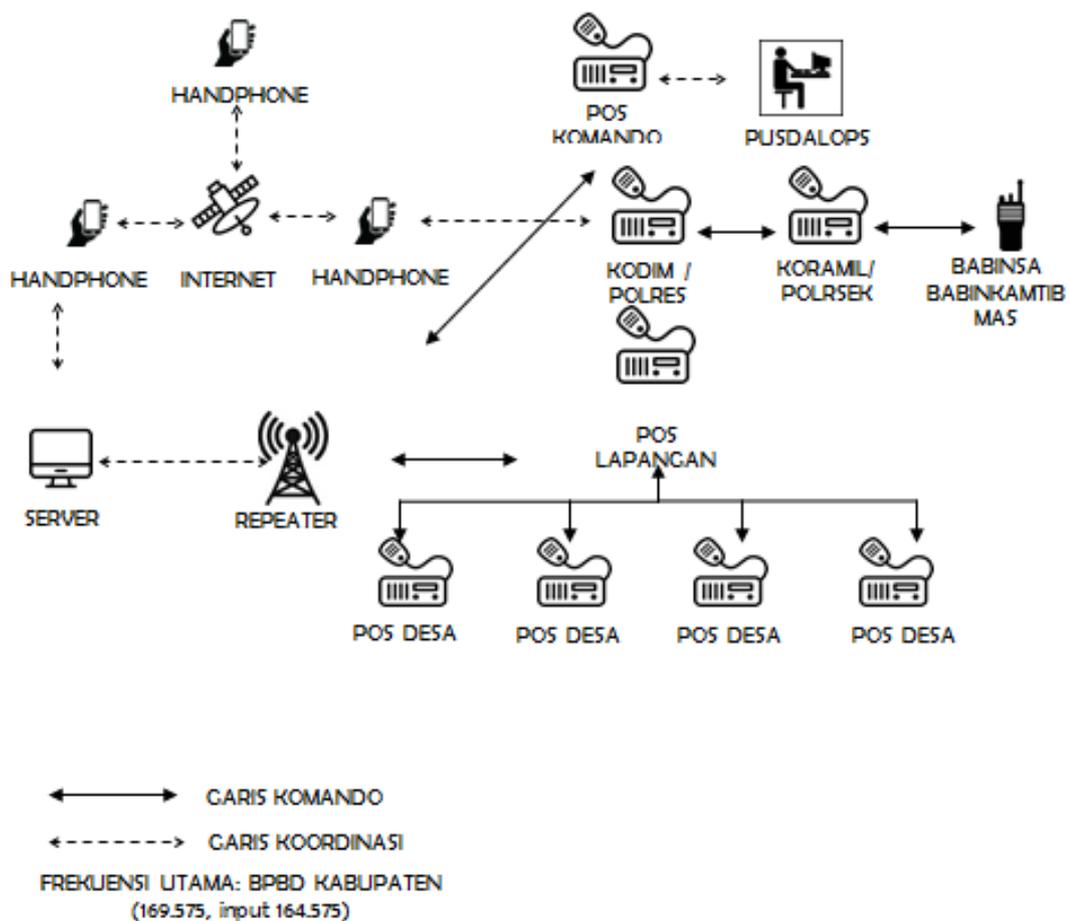
Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
BPBD Provinsi Jateng	KepalaEx-OfficioBPBD Prov Jateng	Koordinator
BPBD Provinsi Jateng	1. Pangdam IV Diponegoro 2. Kapolda Jateng 3. Kalakhar BPBD Prov Jateng	Wakil Koordinator
BPBD Provinsi Jateng	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretariat
1. Bagian Humas Setda Prov. Jateng 2. Diskominfo 3. Pusdalops BPBD Jateng	1. Kepala Bagian Humas Setda Prov. Jateng 2. Ka Diskominfo 3. Ka Pusdalops BPBD Prov Jateng	Bidang Data, Informasi dan Humas
1. Forum PRB Jateng 2. Afi/Alfi 3. RRI 4. Wapena 5. Forum CSR Kesos 6. Kadinda 7. FPT PRB 8. LIDI 9. TVRI 10. PWI 11. Forum TJSLP 12. Hipmi Peduli Jateng 13. Organda	1. Ketua Forum PRB Jateng 2. Ketua Afi/Alfi 3. KaRRI 4. Ketua Wapena 5. Ketua Forum CSR Kesos 6. Ketua Kadinda 7. Ketua FPT PRB 8. Ketua LIDI 9. KaTVRI 10. Ketua PWI 11. Ketua Forum TJSLP 12. Ketua Hipmi Peduli Jateng 13. Ketua Organda	Perwakilan Instansi/Lembaga Terkait
Basarnas	Kepala Kantor SAR Semarang  Kodam IV Diponegoro  <u>Anggota :</u> 1. Polda Jateng 2. SARDA Jateng 3. Satgana PMI 4. SAR MDMC 5. SAR UNS 6. SAR Undip 7. SAR UMS 8. SAR UNNES 9. Ubaloka Kwarda 10. Tagana Provinsi 11. Banser NU 12. Indonesian Off Road Federation (IOF)	Koordinator Kluster Penyelamatan dan Evakuasi  Wakil Koordinator

Lembaga/Instansi	Kedudukan	Peran
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya  BPBD  <u>Anggota:</u> 1. Dinas PUSDATARU 2. Disperakim 3. Dinas Perhubungan 4. Diskominfo 5. Kodam IV Diponegoro 6. Polda Jateng 7. PT. Telkom 8. PDAM Tirta Moedal 9. PLN Distribusi Jateng DIY 10. ORARI 11. RAPI 12. Senkom Mitra Polri	Koordinator Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian Wakil Koordinator
Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan  Kodam IV Diponegoro  <u>Anggota:</u> 1. Polda Jateng 2. RST Kodam IV Diponegoro 3. RS Bayangkara Polda 4. RSU tugurejo 5. RSUD Muwardi 6. RSU Soejarwadi Klaten 7. RSJD Surakarta 8. RSJ Amino Gondo Kusumo 9. RSU margono 10. PMI 11. Yakkum Emergency Unit 12. MDMC	Koordinator Klaster Kesehatan  Wakil Koordinator
Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial  BPBD  <u>Anggota:</u> 1. Kodam IV Diponegoro 2. Polda Jateng 3. PMI 4. Bulog Divre Jateng 5. PDAM Tirta Moedal 6. MDMC	Koordinator Klaster Logistik dan Dapur Umum  Wakil Koordinator

### LAMPIRAN-C: Jaring Komunikasi

Jaring Komunikasi Komando dengan Bidang menggunakan frekuensi radio komunikasi, operasional diatur oleh Kominfo dan Balmon. Sedangkan jaring komunikasi antar Bidang Telepon/HP dan Sosial media (Whatsapp).

#### a. Jaringan Komunikasi di Kabupaten Magelang



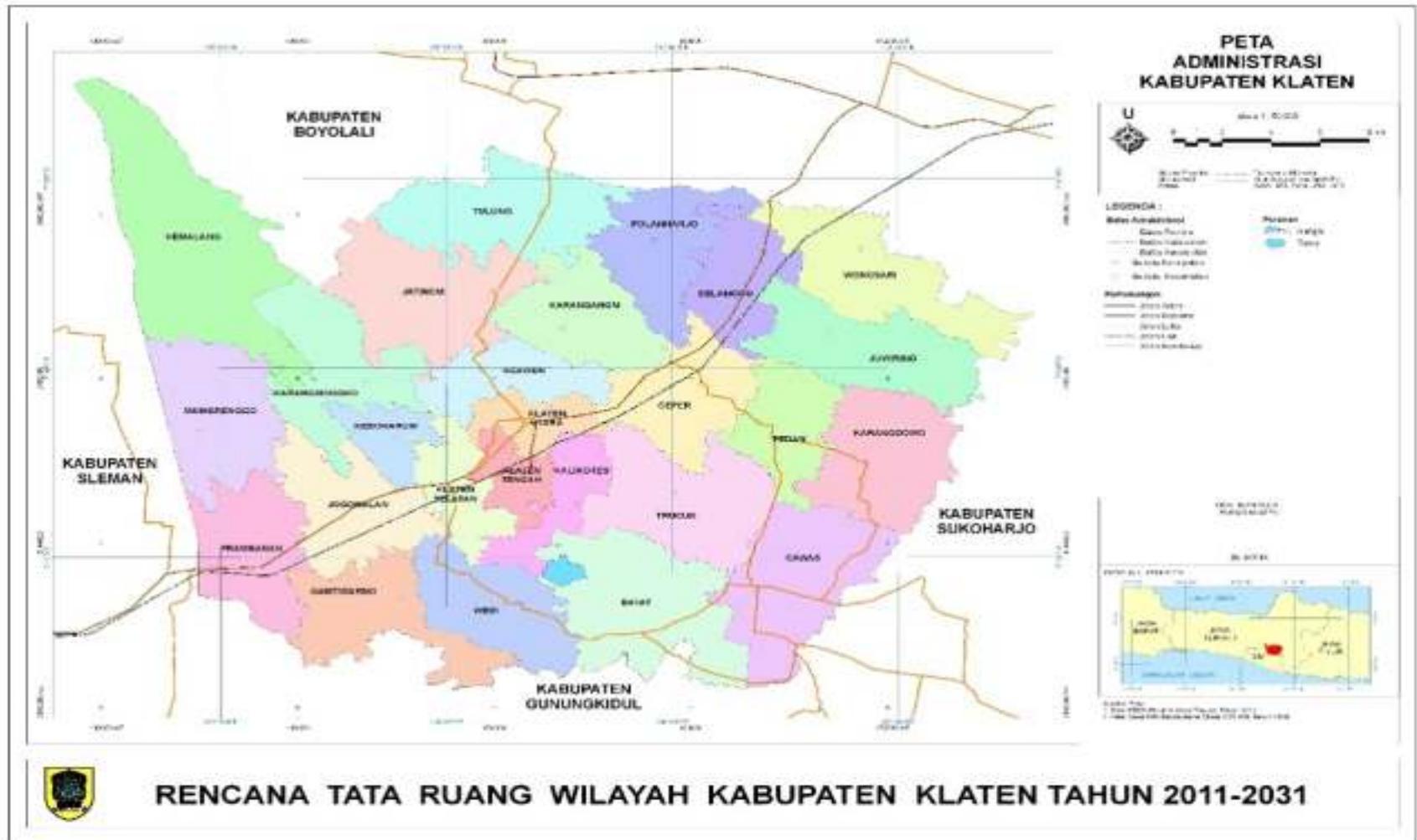
LAMPIRAN-D: Peta-Peta

a. Peta wilayah Kabupaten Magelang

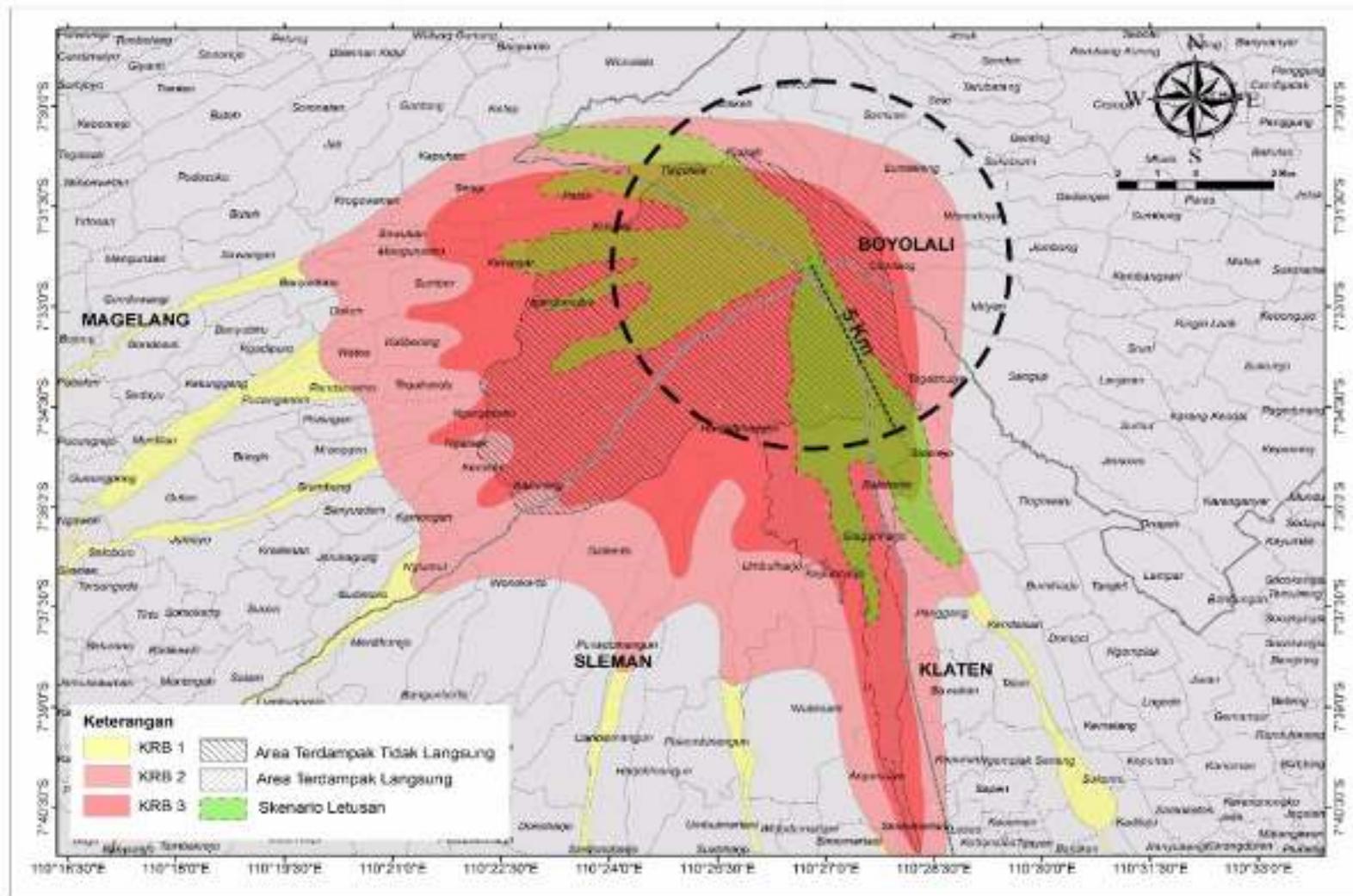




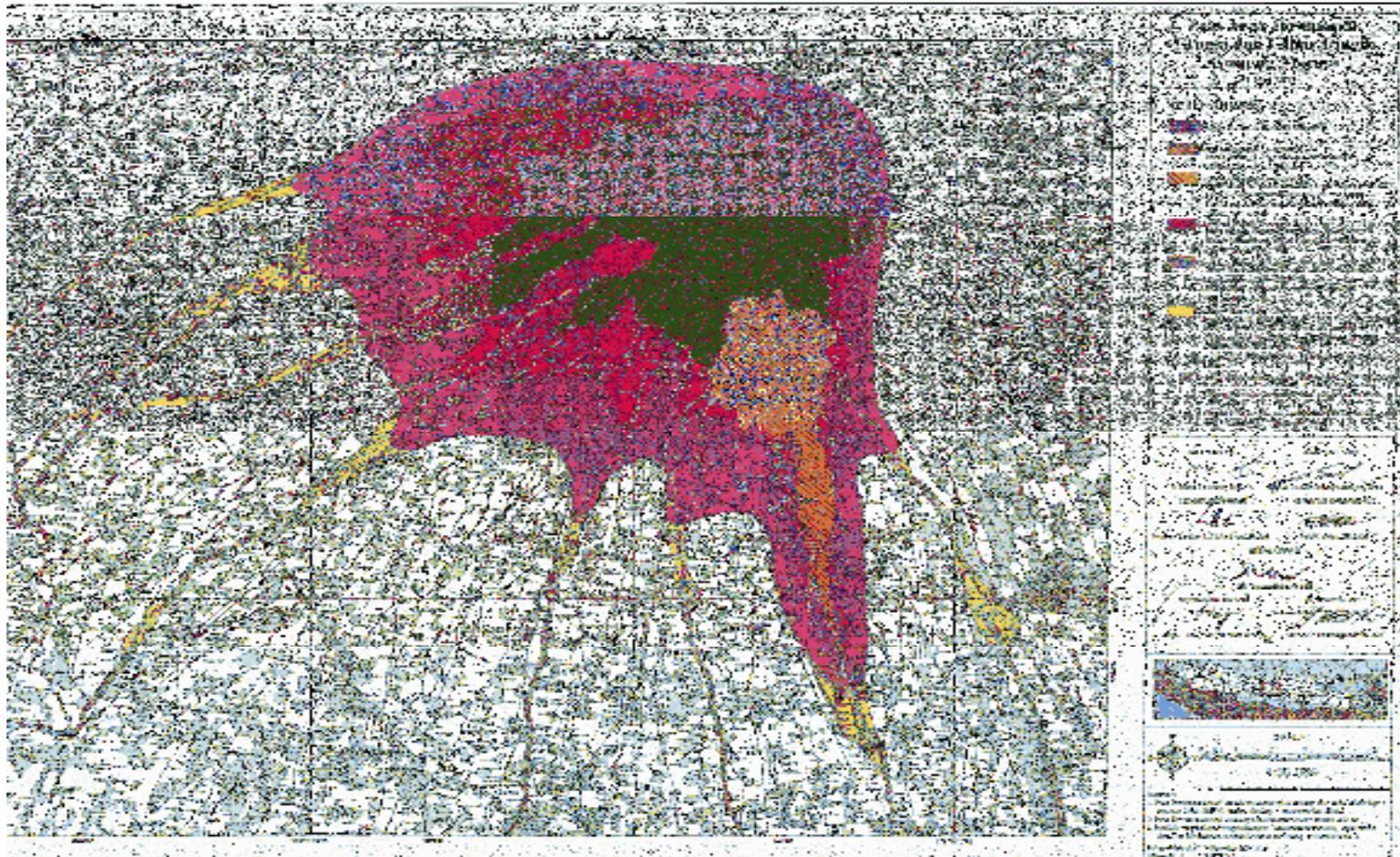
c. Peta Wilayah Kabupaten Klaten



d. Peta Potensi Kejadian Bencana Erupsi Gunung Merapi



e. Peta Area Terdampak Erupsi Gunung Merapi



**LAMPIRAN-E: Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya****a. Kemampuan Sumberdaya di Provinsi Jawa Tengah**

No	Lembaga / Instansi	Kemampuan Sumberdaya	Keterangan
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Personil 50 orang; 2. Sarana : peralatan laboratorium	
2.	Dinas Sosial	(terlampir)	
3.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	a. Personil 10 orang b. Sarana: traktor, alat pertanian	
4	Dinas Komunikasi dan Informasi	1. Personil 237 orang 2. Prasarana: gedung 3unit, internet 100 Mbps 3. Sarana: Komputer 157 unit, pesawat telp. 37 unit, faximile: 8 unit, computer touch screen 2 unit, UPS/stabilizator: 26 unit, LAN internet (server/modem): 6 unit, kendaraan roda 2 : 4 unit, kendaraan roda 4: 21 unit, handycam: 6 unit, HT, 3 unit, handled VHF/UHF: 2 unit, antenna repeater 3 unit, kamera digital 3 unit, mobile VHF/UHF 2 unit, server 15 unit,	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Personil: 105 orang	a. Kepala sekolah /guru SLB diwilayah Jateng (35 kab/kota)  b. Perwakilan balai pengendali pendidikan menengah dan khusus (BP2MK) se Jateng yang sudah mengikuti pelatihan tanggap bencana bid. Pendidikan bagi pengelola pendidikan dan guru 2017
6	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya	1. Backhoe loader: 2 unit 2. Dumtruck: 2 unit 3. Operator: 4 orang	(BPTJ Magelang dan Surakarta)

**b. Proyeksi Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah**

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/lokasi
1	Personil	Orang	50	50	Boyolali
2	Ruang sekretariat	Unit	3	3	Pos AJU Magelang
3	Gudang	unit	1	1	Pos AJU Magelang
4	Ruang Kendali	Unit	1	1	Pos AJU Magelang
5	Sarana dan prasarana sekretariat	Unit	5	5	Pos AJU Magelang
6	Ruang pertemuan	Unit	1	1	Pos AJU Magelang

**c. Kapasitas OPD pada Pos Pendamping**

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
BPBD Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• HT</li> <li>• Armada</li> </ul>	60 10 5 30	Personil Unit Buah Unit
TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Tenda</li> <li>• HT</li> <li>• Peta</li> <li>• Armada</li> </ul>	100 30 30 6 20	Personil Unit Unit Buah Buah
Polri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• HT</li> <li>• Armada</li> </ul>	100 30 20	Personil Unit Buah
Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Komputer</li> <li>• HT/Repeater</li> <li>• Jaringan internet</li> <li>• Jaringan komunikasi dengan beberapa pihak</li> </ul>	150 5 5	Personil Unit Buah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personil</li> <li>• Prasarana : mobil pelayanan Kesehatan Hewan dan motor</li> <li>• Sarana : penyediaan obat hewan, penyediaan pelayanan kesehatan hewan, sosialisasi pengendalian zoonosis dan penerapan kesrawan terdampak bencana</li> </ul>	10	personil

**d. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Penyelamatan dan Evakuasi**

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		
			Kebutuhan	Ketersediaan	Posisi/ lokasi
1	Truck Evakuasi	Unit	150	140	Klaten
2	Truck evakuasi	Unit	45	30	Boyolali
3	BBM	Liter	7.510	7.510	Klaten
4	BBM	Liter	114.931	114.901	Boyolali
5	Personil Rescue	orang	Menyesuaikan	Tersedia di SARDA Jateng, Kantor SAR Semarang, Surakarta dan Karanganyar	Semarang, Boyolali, Klaten, Magelang, Surakarta dan Karanganyar
6	Relawan	Orang	Menyesuaikan	Tersedia	Semarang, Boyolali, Klaten, Kendal, Temanggung dan Magelang

**e. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian**

Berikut adalah data kapasitas OPD dalam klaster sarana dan prasarana pengungsian :

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
BPBD Jateng	• Personil	100	Personil
	• Armada	10	Unit
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	• Personil	12	Personil
	• Alat Berat	1	Unit
	• Armada	-	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	• Mobil tangki air	100	Personil
	• Backhoe	30	Unit
Dinas Komunikasi dan Informasi	• Personil	20	Personil
	• Radio Komunikasi	5	Unit
	• Kendaraan	5	Buah
	• Jaringan internet		
	• Jaringan komunikasi		
Kodam IV Diponegoro	• Personil	50	Personil
	• Alat Berat	10	Unit
	• Jembatan	5	Unit
Polda Jateng	• Personil	50	Personil
	• Kendaraan	15	Unit

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
PT. Telkom	• Personil	11	Personil
	• Akses Internet	9	Instalasi
	• Perahu karet	9	Unit
PDAM	• MCK	-	-
	• Air bersih	7	Instalasi
	• Bak tandon air	30	Unit
PLN	• Mobile Trafo	6	Unit
	• Instalasi listrik		
	• Personil Team PDKB	30	Personil
	• Mobil Yantek		
ORARI	• Personil	30	Personil
RAPI	• Personil	35	Personil
Senkom Polri	• Personil	30	Personil
Dinas Perhubungan	• Personil	30	Personil
	• Kantor	1	Buah
	• Terminal Tipe B	2	Unit
	• Armada	4	Unit
	• Water Barrier	10	Unit

Berikut adalah data Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Sarana dan Prasarana Pengungsian:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Mobil tangki air	Unit	35	23	-
2	Mobil tangki air	Unit	45	45	-
3	Air bersih	m <sup>3</sup>	7.886	7.886	-
4	Bak tandon air	Unit	850	850	-
5	Bak tandon air	Unit	45	45	-
6	MCK	Unit	3.400	3.400	-
7	Tenda peleton	Unit	350	350	-
8	Tenda peleton	Unit	45	45	-

**f. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Kesehatan**

Berikut adalah data kapasitas OPD dalam klaster kesehatan :

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
Dinas Kesehatan	• TGC Dinkes	115	Personil
	• Genset	1	Unit
	• Tenda RS lapangan	1	Unit
	• Feld Bed	40	Unit
	• Armada	5	Unit
	• Alkes	1	Unit

Lembaga/Instansi	Uraian	Kapasitas	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obat</li> <li>• Disinfektan</li> <li>• Alat penjernih air</li> </ul>	1 8 1	Paket Peal Unit
TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter umum</li> <li>• Armada</li> <li>• RS Lapangan</li> </ul>	100 30 2	Personil Unit Unit
POLRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter umum</li> <li>• Armada</li> <li>• RS Lapangan</li> </ul>	100 30 2	Personil Unit Unit
RSUD Tugu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter</li> <li>• Perawat</li> <li>• Ambulance</li> <li>• Tenda RS lapangan</li> </ul>	20 35 5 1	Personil Personil Buah Unit
RSUD Moewardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter</li> <li>• Perawat</li> <li>• Ambulance</li> </ul>	20 35 5	Personil Personil Unit
PMI	• Ambulance	2	Unit
	• Relawan Kesehatan	30	Personil
	• Tenda RS Lapangan	2	Unit
MDMC	• Obat obatan	30	Personil
	• Relawan Kesehatan		
YEU	• Perawat	30	Personil

Berikut adalah data Ketersediaan dan Kebutuhan Klaster Kesehatan:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Perawat	Orang	175	170	-
2	Dokter Umum	Orang	170	170	-
3	Dokter Spesialis	Orang	27	27	-
4	Bidan	Orang	236	236	-
5	Ambulance	Unit	170	170	-
6	Obat obatan	Paket	170	170	-

**g. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik dan Dapur Umum**

Berikut adalah data ketersediaan dan kebutuhan klaster logistik dan dapur umum:

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
1	Personil	Orang	300	300	
2	Beras	Kg	1.122.864	1.022.864	<i>Boyolali</i>

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Volume		Keterangan
			Kebutuhan	Ketersediaan	
3	Beras	Kg	217.963	117.963	<i>Magelang</i>
4	Beras	Kg	50.742	2.944.520	<i>Klaten (kekurangan beras akan dipenuhi oleh Bulog Divre Jawa Tengah dan Divre di masing masing Kabupaten)</i>
5	Hygine kit	Paket	12.516	10.516	-
6	Family kit	Paket	15.042	15.027	-

### h. Estimasi Ketersediaan Sumber Daya Per Kabupaten

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
<b>A. Kabupaten Magelang</b>									
1	Dinas Kesehatan	Dokter Umum	60	Ambulan dan Puskesmas Keliling	58	Puskesmas	29	Jaringan Internet	32
		Dokter Gigi	36		Puskesmas Pembantu	165			
		Perawat	173						
		Bidan	436						
		Ahli Gizi	27						
2	PMI	Dokter Umum	1	Ambulan transport umum	1	Alat dapur umum	1	Telepon	1
		Perawat	8	Ambulan jenazah	1	Dapur umum	1		
		Analisis	2	Kendaraan bak terbuka	1				
		Bidan	2	Bis Donor Darah	1				
		PTTD	1						
		Tenaga Ahli Tanggap Darurat	1						
		Tenaga Terampil:							
		MFR	10						
		DU	10						
		Wash	5						
		Rescuer	5						
		Driver	5						
3	PEMDES Kalibening	Bidan/ Perawat	8	Ambulan, Komputer, dan	1	Balai Desa	1	Sawah	52551

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
				Printer					
4	PEMDES Sewukan	Bidan Desa	1	Laptop	6	Balai Desa	2	HT	20
5	PEMDES Nglumut	Bidan Desa	2	Komputer	5	GOR	1	Tulisan	4
				Laptop	3	Balai Desa	1	Radiopancar	1
						PKD	1	HT	9
						Sekolah	1	Pengeras Suara	6
								Kentongan	9
6	PEMDES Sumber	Bidan Desa	1	laptop	13			HT	30
				Mobil	15				
				Sepeda Motor	300				
7	PEMDES Ngaromulyo	Bidan Desa	1	laptop	6	Chainsaw	2	RPU	1
				Mobil	44	Tandu	1	HT	20
				Truck	17	Genset	2	Megaphone	2
								Speaker	3
8	PEMDES Ngablak	Bidan Desa	1	Komputer	5	GOR	1	HT	25
				Mobil Siaga	1	Lapangan	1	Papan Pengumuman	2
				Sinso	2	Sekolah	3		
				Diesel	1	Gedung	1		
				Mibil Dinas	2				
				Mobil Siaga	1				
9	PEMDES Kaliurang		2	laptop	7	Balai Desa	1	HT	10
				Genset	4				
				Elf	1				
				Pick up	1				

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
10	PEMDES Tegalarandu	Bidan	10	Mobil	64	TPS	8	HT	30
				Truk	34				
11	PEMDES Mranggen	Bidan	1	Komputer	3	Balai Desa	2	Sembako	9
		Perawat	4	Peralatan	5			Papan	4
				Mobsos	1			HT	1
				Mob OPRB	1				
				Minibus	26				
12	PEMDES Ngargosoko			Mobil Siaga	1	Posyandu	7	HT	10
						OPRB	50		
13	PEMDES Keningar			Mobil Sosial	1	Posyandu	1		
				Mobil Pribadi	19	OPRB	40		
				Truk	3				
14	PEMDES Krinjing			Truck/Picup	131			HT	83
<b>B. Kabupaten Boyolali</b>									
1	BPBD	Personil	10	Komputer	1	Gudang Logistik	1	Lemari	2
		Relawan	50	Mobil tangki air	1	Bantuan Peta tematik	1	Faximile	1
		Personil Logistik	15	Mobil	2	Tenda Peleton	2	GPS	1
		Personil TEA	4	Motor	4	Tenda Pengungsian	3	Internet	1
				Kendaraan roda 4	1	Veltbed	15	Proyektor LCD	1
				Motor Trill	4	Pompa air	1	Papan Data	1

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
				Mobil rescue	2	Handycam dan Kamera video	2	Printer	1
				Mobil Rescue (RTU)	2	Radio	7	Sepatu boot	4
				Genset	1	Pesawat RIG	1	Pemancar canon	3
						Pusdalops	1	Chain saw	5
								Alat pemotong baja dan beton	1
								Topi proyek	4
								Tenda Gulung	127
								Kunci Hidran	2
								Bak Tandon	2
								Sarangan selang hisap	1
								Selang buang tiga	1
								Selang hisap spiral	1
								Tandon air 100 l	1
								Wireless	1
								Megaphone	2
								Jerigen	5
2	Disnakertrans	Personil	2	Genset	1	Tenda Pengungsian	3	Printer	1
		Personil TEA	1			Veltbed	10		
						Radio	2		
3	DPU ESDM	Personil	4	Truk	2			Cangkul	30
		Personil TEA	5	Pick up	3			Chain saw	5
				Mobil tangki air	1			Helm Penyelamat	8
				Excavator	1				

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
				Truk tinja	1				
4	Dinkes	Personil Perawat Bidan Tenaga Laboratorium Psikolog	2 29 19 5 1	Ambulan Genset	6 1	Posyandu Masker Sarung tangan Gudang Farmasi Pesawat RIG	29 11 20 1 1	Faximile Printer	1 1
5	POLRES	Personil	102	Truk Motor	1 10				
6	KODIM	Personil Personil TEA	102 100	Truk Teropong	1 1	Gudang Logistik Bantuan Tenda Peleton Tenda Pengungsian Peralatan dapur umum Radio Pesawat RIG	1 2 2 2 10 1	Lemari GPS Papan Data	2 1 1
7	Humas PemKab	Personil	2					Faximile	1
8	Diskominfo	Personil Personil Logistik	2 15	Mobil Mobil Rescue (RTU)	1 1	Gardu Pemantau Handycam dan Kamera video Radio Bandara Pesawat RIG	2 2 1 1 1	Faximile Internet Printer	1 1 1
9	Disdikbud	Personil	2						
10	Disdukcapil	Personil	2						

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
11	FPRB	Personil Personil Logistik	2 50					Jerigen	2
12	Dinas Perikanan dan Peternakan	Personil	2	Truk	3				
13	Balai desa TES							Lemari	45
14	Pem kecamatan	Personil Logistik	6			Komputer	3	Lemari	3
15	RSUD	Dokter umum Perawat Apoteker Tenaga Laboratorium Personil evakuasi	5 5 1 5 4	Mobile jenazah Genset	4 1	Lab. Kesehatan Masker Sarung tangan	1 10 50	Faximile	1
16	Telkom							Internet	1
17	PDAM			Mobil tangki air	1				
18	Pandanarang	Dokter umum Perawat Tenaga Laboratorium Psikolog	1 1 1 2	Ambulan Mobile jenazah	4 4			Tandu	8
19	RS PKU Aisyiah	Dokter umum Perawat Apoteker Bidan Tenaga Laboratorium	1 1 1 2 1	Ambulan Mobile jenazah	1 4	RS Rujukan	1		
20	RS Umi Barokah	Dokter umum Perawat	1 1	Mobile jenazah	4			Tandu	4
21	RS Sisma Medika	Dokter umum	1	Mobile jenazah	4				

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
22	RS Banyudono	Dokter umum Perawat	1 1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
23	RSUD Simo	Dokter umum	1			RS Rujukan	1	Tandu	8
24	RSU Asy- Syifa Sambi Dinkes	Dokter umum Apoteker	29 1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
25	RSUD Boyolali	Dokter Spesialis Bidan	10 10	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
26	RS Karanggede	Perawat	1	Mobile jenazah	4	RS Rujukan	1		
27	PMI	Personil	10	Ambulan Mobil Rescue (RTU) Mobile jenazah Genset	1 2 1 1	Masker Tenda Peleton Veltbed Pompa air Radio Pesawat RIG	10 2 10 1 10 1	Cangkul Chain saw Bak Tandon	20 2 10
28	RSI Hidayah					RS Rujukan	1	Tandu	4
29	PKU Banyu Bening							Tandu	5
30	BASARNAS	Personil	66			Radio Pesawat RIG	5 1		
31	Dishub	Personil	10						
32	Dinsos	Personil Personil Logistik	10 15	Kendaraan roda 4 Mobil Rescue (RTU)	1 1	Tenda Dapur Umum Alat Dapur Umum Peralatan dapur umum	9 1 4		
33	Dinas Pertamanan							Sekop	8

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
34	SATPOLL PP/Damkar			Kendaraan roda 4 Mobil Damkar	1 5			Helm Penyelamat	10
35	Dinas Koperasi			Kendaraan roda 4	1				
36	PEMDES	Personil Logistik	90			Pesawat RIG	14		
37	Disperinda	Personil TEA	15						
38	PDAM							Bak Tandon	10
39	MMC Merapi FM					Studio Radio Darurat Exciter 1000 watt dan antena 50 watt Komputer Perangkat Studio Radio Receiver Generator Penyiar Jurnalis Admin medsos	1 1 3 2 1000 1 7 10 6		
40	Disdikbud	Personil	30						
<b>C. Kabupaten Klaten</b>									
1	BPBD	Personil Personil Posko Induk Personil Posko Kecamatan	150 35 10	Laptop Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	7 14 7	Pesawat RIG HT Repeater VHP	7 40 1	Peralatan makan minum White board Kertas HVS	7 7 3

No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
		Personil Shelter	30	Motor	1	Komputer dan Link ITKP	1	PC	1
		Relawan	12	Mobil Operasional	2	Tenda Posko	5	GPS	2
		Fasilitator	12	Mobil Pick up	8	Peta kerja	1	Chainsaw	1
				Mobil tangki air	4	Tali evakuasi 300 m	1	Tandu	8
				Mobil Personil	4	Mesin pemadam	3	Tampungan Air	4
				Mobil Ambulan	8	Tenda Serbaguna	4	Peralatan dapur	4
				Genset	2	Tenda Pleton	4	LCD Proyektor	4
						Tenda Regu	5	Soundsystem	4
						Tabung Oksigen	4		
2	POLRES	Personil kesehatan	6	Mobil	4				
3	KODIM	Personil	150	Kendaraan roda 2	14				
		Personil kesehatan	6	Kendaraan roda 4	7				
		Personil evakuasi	12						
4	POLRES	Personil	150	Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
5	SATPOL PP			Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				
6	Dishub			Kendaraan roda 2	14				
				Kendaraan roda 4	7				

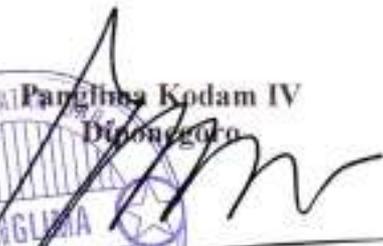
No	Nama Lembaga	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Transportasi	Jumlah	Sarana	Jumlah	Kemampuan Lainnya	Jumlah
7	SAR	Personil	150						
8	Damkar			Mobil Damkar	1				
9	Dinkes	Dokter	5			Tabung Oksigen	12	Tandu	8
		Paramedis	10			Kursi roda	8	Tikar	100
		Bidan	5			Obat antisesak	400		
		Guru	10			Velbed	50		
		Relawan Psikososial	5						

**LAMPIRAN-F: Prosedur Tetap**

**LAMPIRAN-G: Lembar Komitmen**

**LEMBAR KOMITMEN  
RENCANA KONTINGENSI ERUPSI GUNUNG MERAPI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017**

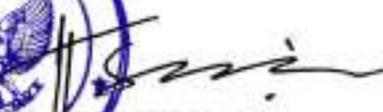
Kami yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk melaksanakan beban tugas sesuai yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi

  
Panglima Kodam IV  
Diponegoro  
  
WURYANTO, S.Sos. M.Si.  
Mayor Jenderal TNI

  
Kapolda Jawa Tengah  
  
Drs. CONDRU KIRONO, MM., M.Hum.  
Inspektur Jenderal Polisi

Pj. Bupati Magelang;  
  
  
Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si

Bupati Boyolali;  
  
  
BUDI SAMODRO

Bupati Klaten;  
  
  
Hi. SRI MULYANI

**LAMPIRAN-H: Berita Acara Penyusunan Renkon**